



UNIVERSITAS INDONESIA

**MERETAS JALAN KEBEBASAN:
PERAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) DALAM
MEWUJUDKAN JURNALISME INDEPENDEN DI INDONESIA
1994-1999**

RINGKASAN DISERTASI

**Raisye Soleh Haghia
NPM. 1906341246**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA
DEPARTEMEN SEJARAH
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK**

JUNI 2025



UNIVERSITAS INDONESIA

**MERETAS JALAN KEBEBASAN:
PERAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) DALAM
MEWUJUDKAN JURNALISME INDEPENDEN DI INDONESIA
1994-1999**

RINGKASAN DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor

**Raisye Soleh Haghia
NPM. 1906341246**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA
DEPARTEMEN SEJARAH
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK**

JUNI 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhaanahu Wata'aalaa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “Meretas Jalan Kebebasan: Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dalam Mewujudkan Jurnalisme Independen di Indonesia 1994-1999” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Sejarah di FIB UI. Memasuki Program Doktor Ilmu Sejarah FIB UI pada tahun 2019, saya tidak menyangka akan menghadapi perjalanan yang begitu berat namun penuh makna. Proses penelitian dan penulisan disertasi ini tidak hanya menguras tenaga, pikiran, waktu dan materi, tetapi juga menjadi medan pertempuran terbesar melawan keraguan diri dan kelelahan mental. Sebagai seorang dosen sekaligus ibu rumah tangga, saya sering kali harus bernegosiasi dengan waktu, mencuri-curi kesempatan di sela kesibukan mengajar dan mengurus keluarga untuk tetap bisa menekuni penelitian ini. Dalam perjalanan akademik ini, saya sempat mengalami masa-masa terpuruk. Namun, saya harus kembali bangkit dan terus berjuang karena saya yakin “tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha”. Disertasi tentang perjuangan AJI dalam memperjuangkan kebebasan pers ini pun menjadi cerminan perjalanan saya sendiri, sebuah perjuangan untuk tetap independen dan konsisten di tengah badai tuntutan dan keterbatasan. Penyelesaian disertasi ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari banyak pihak. Dengan hati yang penuh syukur, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya.

Penyusunan disertasi ini merupakan perjalanan intelektual yang penuh tantangan sekaligus pembelajaran berharga. Saya bersyukur dapat dibimbing oleh Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum., selaku promotor sejak 2021. Beliau tidak hanya sabar dan cermat, tetapi juga konsisten memberikan inspirasi yang mengasah pola pikir saya sebagai sejarawan. Salah satu nasihat yang selalu terngiang, “Sye, ingat sejarah adalah ilmu tentang manusia. Jangan terjebak dengan struktur. Temukan peristiwa maka struktur akan terlihat”. Begitu cara Prof. Susanto mengingatkan dan mengembalikan saya ke “jalur yang benar” sebagai sejarawan setelah saya “terjebak” dengan kemegahan struktur untuk menjelaskan AJI.

Diskusi metodologis dengan Prof. Susanto menjadi titik balik krusial. Meski tidak memaksakan pendekatan tertentu, beliau menekankan pentingnya menjaga identitas keilmuan sejarah. Pemikiran Marc Bloch tentang “sejarawan sebagai pihak yang paling sadar akan perubahan waktu” kerap beliau kutip untuk mengingatkan saya tentang esensi sejarah yang mempelajari perubahan dalam dimensi waktu yang konkret dan dinamis. Sehingga, bimbingan

dengan Prof. Susanto membantu saya menyusun tonggak-tonggak penting AJI secara kronologis-tematis tanpa kehilangan narasi humanis. Proses ini juga diwarnai dinamika administratif. Pada 2024, Dr. Linda Sunarti, S.S., M.Hum., yang awalnya sebagai co-promotor, beralih menjadi promotor, seiring Purna tugas Prof. Susanto. Namun secara substansi, bimbingan beliau tetap berlanjut hingga disertasi ini selesai. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Susanto atas dedikasi, keteguhan, dan *spirit of criticism*-nya yang menjadikan karya ini siap dipertanggungjawabkan.

Penghargaan terdalam juga saya sampaikan kepada Dr. Linda Sunarti, S.S., M.Hum., selaku co-promotor dan selanjutnya menjadi promotor yang tidak kenal lelah mendorong penyelesaian disertasi ini. Sapaan akrab “Mbak Linda” mencerminkan kedekatan kami, tetapi dibalik itu, beliau adalah sosok tegas yang terus memacu saya memenuhi target akademik, mulai dari penulisan hingga publikasi jurnal. Berkat motivasinya, artikel saya berjudul “*Building a Fortress of Independent Journalism: Historical Study of the Role of Aliansi Jurnalis Independen (AJI) in Indonesia, 1994-1999*”, berhasil terbit di Jurnal Paramita (Scopus Q2) pada 24 April 2025, salah satu prasyarat sidang promosi.

Lebih dari itu, Mbak Linda menjadi *critical reader* yang menguji konsistensi metodologis disertasi ini. Pertanyaan-pertanyaan kritisnya yang selalu mengusik pikiran saya yang selalu beliau tanyakan, “Sye, jika memang ini pakai strukturis, apa buktinya? Mana aktor-aktornya?”. Hal ini mendorong saya untuk mengeksplorasi lebih dalam hingga menemukan justifikasi teoritis. Pada akhirnya, saya berhasil membuktikan bahwa pendekatan strukturis memang relevan untuk menganalisis aksi kolektif AJI, di mana *causal power* perubahan justru bersumber dari dinamika internal struktur sosial. Melalui diskusi dengan beliau, saya menyadari bahwa pendekatan strukturis tidak hanya menjelaskan keterbatasan (*constraining*) struktur terhadap aktor, tetapi juga bagaimana AJI sebagai *agent* justru memanfaatkan celah dalam struktur (*enabling*) untuk menciptakan perubahan, sebagaimana diuraikan Lloyd (1999).

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Dr. Abdurakhman, S.S., M.Hum. yang akrab saya sapa “Mas Maman” atas dukungannya yang tak ternilai selama perjalanan studi doktoral dan pengembangan karier akademik saya di Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI. Lebih dari sekadar kolega, beliau telah menjadi mentor dan pendukung setia yang senantiasa memberikan dorongan moril maupun bantuan materil. Semangatnya yang tidak pernah padam dalam memotivasi saya untuk menyelesaikan disertasi ini menjadi energi penting yang mengiringi proses penyelesaian karya akademik ini. Dukungan tidak hanya berhenti pada kata-kata penyemangat, tetapi juga terwujud dalam berbagai bentuk bantuan

konkret yang sangat berarti bagi kelancaran studi dan pengembangan profesional saya sebagai dosen.

Saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada para pelaku sejarah dan pendiri AJI yang dengan sukarela berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Khususnya, saya berterima kasih kepada para pendiri AJI yaitu Satrio Arismunandar, Dhia Prekasha Yoedha, Dadang RHS, dan Tosca Santoso, yang tidak hanya memberikan kesempatan wawancara, tetapi juga membuka akses kepada arsip-arsip penting organisasi. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ignatius Haryanto, Dasman Djamaludin, Jus Soema Di Pradja, Eski Suyanto, dan Abdul Manan atas kontribusinya sebagai narasumber. Cerita dan kesaksian mereka menjadi sumber lisan yang sangat berharga, memperkaya pemahaman tentang dinamika AJI dalam konteks kehidupan pers Indonesia. Tanpa partisipasi pendiri dan aktivis AJI, serta wartawan senior yang menjadi saksi sejarah, penelitian ini tidak akan memiliki dasar empiris yang kuat.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh asisten peneliti yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyelesaian disertasi ini. Muhammad Abdul Karim dengan tekun membantu melacak berbagai sumber penting terutama koran *Suara Pembaruan*, sementara Muhammad Gilang tidak hanya berperan dalam mengumpulkan sumber dari tabloid *Detik* tetapi juga kerap menemani saya dalam proses wawancara dengan narasumber. Amanda Latifah Laksmiana Putri dengan cermat membantu saya melacak berbagai artikel penting dari majalah *Tempo* yang menjadi salah satu sumber dalam penelitian ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Nanda Salsabila yang dengan sabar dan teliti membantu mengoreksi berbagai kesalahan teknis penyetoran, memastikan format penulisan sesuai dengan pedoman Universitas Indonesia, serta turut mendampingi beberapa sesi wawancara. Tanpa dedikasi dan kerja keras mereka, proses penyelesaian disertasi ini tentu akan menghadapi lebih banyak tantangan.

Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI yang telah memberikan dukungan moral dalam penyelesaian disertasi ini. Terima kasih kepada Dr. Didik Pradjoko, S.S., M.Hum., Dr. Siswantari, S.S., M.Hum., Agus Setiawan, S.S., M.Si., Ph.D., Dr. Yuda Benharry Tangkilisan, S.S., M.Hum., Noor Fatia Lastika Sari, M.Hum., Teuku Reza Fadeli, S.Hum., M.A., Ph.D., Yudi Bachrioktora, S.S., M.A. Secara khusus, saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Dwi Mulyatari, S.S., M.A., yang akrab saya sapa Mbak Erry, atas motivasinya dan dukungan mental yang tak ternilai. Saya selalu teringat nasihat bijak dari Mbak Erry, “Sye...Sye... terus semangat dan ingat filosofi pantulan bola basket. Semakin besar tekanan yang dihadapi, semakin tinggi pula

pantulan bola itu.” Kata-kata penyemangat ini telah menjadi pegangan saya dalam menghadapi setiap tantangan selama penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada kolega-kolega di Departemen Sejarah FIB UI yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi doctoral saya. Secara khusus, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dr. Rostineu, M.A., yang akrab saya sapa Mbak Ros, yang telah menjadi teman dalam berbagai momen. Tidak hanya sebagai teman *curhat*, teman makan siang, partner diskusi akademik, sekaligus teman untuk mengasah kemampuan bahasa Sunda saya. Nasihat yang selalu saya ingat, “Sye, S3 itu bukan perkara kesempurnaan tulisan, ingat S3 terbatas oleh waktu yang telah ditentukan”, pada akhirnya terbukti benar. Meski sampai berjuang keras untuk mencapai kesempurnaan ideal, batas waktu studi yang maksimal membuat saya menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata Mbak Ros. Tak lupa, terima kasih kepada Dr. Afriadi, S.Hum., M.Hum., yang menjadi bukti nyata bahwa ketekunan akan membuahkan hasil. Keteladanan dalam menjalani proses akademik senantiasa menginspirasi saya untuk terus berjuang hingga akhirnya mencapai tujuan. Dukungan dari kedua kolega ini telah menjadi penyeimbang yang berharga antara idealisme akademik dan realitas penyelesaian studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mbak Wiwik, Sekretaris Departemen Ilmu Sejarah FIB UI yang selalu memberikan informasi yang sangat berharga baik dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian studi saya.

Perjalanan panjang menyelesaikan disertasi ini terasa lebih ringan berkat kebersamaan dengan teman-teman seangkatan yang selalu menghadirkan keceriaan di tengah kepenatan. Kami menyebut diri kami “Genk Motor”, sebuah julukan yang lahir dari kebiasaan kami yang harus terus membayar biaya administrasi semester seharga motor Mio. Terima kasih kepada Mbak Lenny Agustine dan Bu Arum, yang menjadi teman setia dalam mengisi “malam-malam semedi” di Lenny’s Villa, tempat kami berdiskusi, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Kepada Mas Ardha, Pak Israr, dan Kak Nurbaiti, terima kasih telah memberi warna dalam perjalanan akademik saya dengan canda tawa dan dukungan tak ternilai. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Alm. Mas Wasith, yang tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga memberikan inspirasi bagi saya untuk memilih AJI sebagai topik disertasi ini. Jasa Mas Wasith akan selalu hidup dalam karya ini. Tak lupa, terima kasih sepenuh hati kepada Bu Ester, *partner* sejati dalam menjalani proses bimbingan bersama Prof. Susanto. Kami kerap berpegangan tangan, saling menyemangati untuk bertahan dan melanjutkan studi ini. Dan hal yang paling berkesan, Bu Ester selalu merangkul dan menyediakan bahunya sebagai sandaran saya menghadapi masa-masa paling sulit dalam perjalanan penulisan disertasi ini, hingga

akhirnya saya bisa bangkit kembali. Tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan sebermakna ini.

Tak lupa, saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada “Genk Piknik”, yaitu Tanpi, Butiw, Pepita, Sachi, Neng Empit, Mbak Di, Ebo, Mbak Dian, yang selalu menjadi pelipur di tengah kesibukan akademik. Kami kerap berkumpul di meja persegi kami, ditemani teh hangat spesial dari ceret khusus, saya menemukan “dunia lain” yang penuh tawa dan kehangatan. Setiap obrolan ringan di sana menjadi ruang untuk bernafas dengan lega, mengisi kembali energi setelah berlutut dengan dunia akademis. Kebersamaan dengan kalian adalah penyeimbang sempurna dalam perjalanan panjang menyelesaikan disertasi ini. Kehangatan kalian menjadi rumah kedua bagi saya untuk selalu merindukan untuk kembali.

Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih banyak kepada Alm. Bapak Ali Taryono dan Almh. Ibu Nani Lesmanawati. Meskipun kalian sudah tiada, namun kalian tetap menjadi panutan bagi saya. Selanjutnya Gina Anggiana, S.Sos., dan Handini Novianti, Amd., yang telah menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup saya. Melalui keteladanan kalian, saya belajar bahwa kemandirian dan tantangan hidup adalah bagian yang pasti akan terlewati dengan keteguhan hati. Terima kasih atas setiap bantuan dan dukungan yang tak ternilai selama ini. Kebersamaan kita telah menjadi kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan tahap penting ini. Terutama kebersamaan kita di penghujung tahun 2024 ketika saya terjebak dalam kegelisahan akademik, kalian telah menjadi kekuatan yang mengembalikan semangat saya. Kalian adalah “rumah” tempat saya menemukan kembali diri, bercerita tanpa beban, dan mengumpulkan keberanian untuk menyelesaikan disertasi ini.

Dengan penuh kasih, saya persembahkan penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih kepada orang-orang terdekat dalam hidup saya. Suamiku tercinta, Haizan, S.T., serta kedua cahaya mataku, Keysha Izzayani Mufeda dan Fayyasy Rashif Mohamed. Mereka adalah pilar utama yang tak henti memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa tulus sehingga studi saya dapat terselesaikan. Mereka saksi sejati perjuangan panjang ini. Melihat langsung detik-detik saya terjatuh dan bangkit kembali, hari-hari penuh air mata, dan momen-momen kecil penuh perjuangan. Tanpa kelapangan hati mereka dalam memahami kesibukan saya, tanpa kesediaan mereka menjadi garda terdepan yang selalu siap membantu, mustahil disertasi ini dapat terwujud. Dengan hati yang tulus, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala waktu yang terabaikan, atas peran sebagai istri dan ibu yang tidak selalu bisa hadir sempurna. Namun semoga pencapaian ini menjadi warisan berharga bagi anak-anakku, bahwa setiap mimpi membutuhkan konsistensi, bahwa pendidikan adalah perjuangan mulia yang pantas untuk diperjuangkan. Khususnya untuk Keysha dan Fayyasy, izinkan Ibu berharap,

semoga perjuangan ini menjadi inspirasi untuk kalian meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagaimana Ibu telah berusaha mencontohkan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berkarya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih memiliki banyak keterbatasan. Namun, dengan kerendahan hati, saya berharap penelitian tentang perjuangan AJI ini dapat memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, sebagai mozaik baru dalam historiografi pers Indonesia yang mengangkat narasi perlawanan bawah tanah di era Orde Baru. Kedua, sebagai bukti empiris tentang kekuatan konsistensi, bagaimana AJI bertahan melalui berbagai represi dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Terakhir, sebagai inspirasi bagi generasi muda tentang pentingnya keberanian intelektual dalam membela prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Semoga karya ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif, sekaligus pengingat bahwa perjuangan mempertahankan kebenaran adalah maraton tanpa garis finis.

“Sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta, tetapi juga dengan kesabaran dan keteguhan hati.”

Depok, 10 Juni 2025

Raisye Soleh Haghia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dan mengungkapkan peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia periode 1994-1999, sebagai respons terhadap represi sistem pers era Orde Baru. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana represi pers Orde Baru memicu pembentukan AJI sebagai gerakan perlawanan jurnalis, serta strategi dan dampaknya terhadap perluasan ruang demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan metode sejarah dengan analisis sosiologis gerakan sosial dan politik kekuasaan, untuk mengkaji tentang interaksi antara aktor non-negara (*enabling*) dan struktur politik yang represif (*constraining*). Pendekatan ini dilakukan dengan analisis literatur, arsip AJI, dan wawancara mendalam dengan para aktivis AJI. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kelahiran AJI dipicu oleh struktur politik Orde Baru yang hegemonik, khususnya setelah pembredelan sejumlah media pada 1994, yang memantik solidaritas di kalangan jurnalis progresif. AJI tidak hanya berfungsi sebagai wadah perlawanan simbolis, tetapi juga membangun jaringan alternatif melalui penerbitan bawah tanah, pelatihan dan advokasi jurnalis serta membangun solidaritas internasional. Peran ganda AJI sebagai organisasi profesional dan gerakan sosial, memungkinkan AJI bertahan meski menghadapi represi negara, termasuk kriminalisasi dan intimidasi. Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan AJI berkontribusi pada desakan reformasi pers pasca 1998 yang akhirnya melahirkan UU Pers No. 40 Tahun 1999, sekaligus menjadi cikal bakal gerakan masyarakat sipil dalam transisi demokrasi. Implikasi teoritis penelitian ini memperkuat relevansi model mobilisasi politik Charles Tilly dalam konteks gerakan sosial Indonesia, khususnya dalam historiografi sejarah pers di Indonesia dimana struktur yang represif justru melahirkan resistensi terorganisir. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya peran organisasi jurnalis dalam menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Penelitian ini juga menyoroti dimensi sosiologis dari gerakan AJI, termasuk pembentukan identitas kolektif jurnalis independen yang melampaui kepentingan profesional. Studi ini diharapkan memberikan perspektif baru dan memberikan sumbangan pengembangan sejarah pers.

Kata Kunci: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kebebasan Pers, Orde Baru, Demokrasi, Gerakan Sosial.

ABSTRACT

This study analyzes and reveals the role of the Independent Journalists Alliance (AJI) in fighting for press freedom in Indonesia during the period 1994-1999, as a response to the repression of the press during the New Order era. The study aims to examine how the New Order's repression of the press triggered the formation of AJI as a journalist resistance movement, as well as its strategies and impact on the expansion of democratic space. This research uses a multidimensional approach that integrates historical methods with sociological analysis of social movements and political power to examine the interaction between non-state actors (enabling) and repressive political structures (constraining). This approach was conducted through literature analysis, AJI archives, and in-depth interviews with AJI activists. The findings reveal that the birth of AJI was triggered by the hegemonic political structure of the New Order regime, particularly after the closure of several media outlets in 1994, which sparked solidarity among progressive journalists. AJI not only served as a symbolic resistance platform but also built alternative networks through underground publishing, journalist training and advocacy, and fostering international solidarity. AJI's dual role as a professional organization and social movement enabled it to survive despite state repression, including criminalization and intimidation. Furthermore, this research shows that AJI's struggle contributed to the push for press reform after 1998, which ultimately led to the enactment of Press Law No. 40 of 1999, as well as becoming the precursor to the civil society movement in the democratic transition. The theoretical implications of this research reinforce the relevance of Charles Tilly's model of political mobilization in the context of Indonesian social movements, particularly in the historiography of press history in Indonesia, where repressive structures have given rise to organized resistance. Practically, these findings emphasize the importance of journalists' organizations in safeguarding press freedom as a pillar of democracy. This research also highlights the sociological dimensions of the AJI movement, including the formation of a collective identity among independent journalists that transcends professional interests. This study is expected to provide new perspectives and contribute to the development of press history.

Keywords: Alliance of Independent Journalists (AJI), Press Freedom, New Order, Democracy, Social Movement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
Metode dan Sumber Data Penelitian.....	6
Kerangka Teori dan Metodologi	6
Hasil Penelitian	13
Kesimpulan.....	29
DAFTAR REFERENSI	31

RINGKASAN DISERTASI

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pers¹, sebagai pilar keempat demokrasi, berperan penting dalam menjaga pemerintahan yang sehat melalui fungsi pengawasan kekuasaan (*Watchdog*)² dan mekanisme *checks and balances*.³ Pers harus menyajikan informasi berimbang supaya masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan akuntabilitas kekuasaan. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik, membentuk opini rasional, dan mendorong partisipasi aktif warga negara.⁴ Oleh karena itu, kemerdekaan dan independensi pers sangat penting bagi demokrasi.⁵ Namun, dalam sejarah Indonesia, khususnya era Orde Baru (1966-1998), kebebasan pers justru dibatasi secara struktural dan sistematis. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.⁶

¹ Istilah pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *press* dapat mempunyai pengertian luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melalui proses pencetakan, seperti surat kabar dan majalah yang dikenal sebagai media cetak. Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech*, sedangkan dalam pengertian sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press*, yang kedua-duanya tercakup dalam pengertian *freedom of expression*. Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu: pertama ia merupakan media komunikasi tertua di dunia, dan kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, dan bukan merupakan unsur yang asing dan terpisah dari padanya. Dan sebagai lembaga masyarakat ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dari sudut pandang demikian ini menjadi jelas, bahwa pers menjalankan fungsinya sebagai salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat. Sebagai media komunikasi, pers harus hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam suatu keserasian sosiologis. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan falsafah yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur sosial-politik yang berlaku. Lihat F. Rachmadi. (1990). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 9–10.

² James Deane. (2015). "Media and Communication in Governance: It's Time for a Rethink," dalam *A Governance Practitioner's Notebook: Alternative Ideas and Approaches*, disunting oleh Alan Whites, et al., OECD–DAC. Lihat juga Michael E. Howard. (2019). *How journalists and the public shape our democracy from social media and "fake news" to reporting just the facts*. Georgia Humanities Council.

³ Bagir Manan. (2013). "Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum". Dalam *Jurnal Dewan Pers Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers*. Jakarta: Dewan Pers., hlm. vii.

⁴ Wilbur Schramm. (1977). *The Process and Effects of Mass Communication*. Urbana: University of Illinois Press, hlm. 38.

⁵ Rahmon Amri, dkk. (2017). *Merawat Kebebasan Pers Dengan Objektivitas*. Jakarta: Dewan Pers.

⁶ Orde Baru adalah istilah yang diberikan oleh Angkatan Darat yang menggambarkan bukan sekedar pergantian pucuk kepemimpinan Presiden Republik Indonesia melainkan merupakan pergantian yang merefleksikan akhir dari suatu zaman dan dimulainya suatu zaman baru. Zaman itu dinamakan Orde Baru. Angkatan Darat menyebutkan bahwa: Orde Baru hakekatnya adalah suatu sikap mental. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang dijiwai oleh moral Pantja Sila, khususnya oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Orde Baru menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan, Orde Baru menginginkan suatu tatanan susunan yang lebih stabil berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susunan yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang, mengembangkan kultus individu. Akan tetapi, Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki tjiri-tjiri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan. Orde Baru adalah suatu tata susunan baru di segala bidang yang berlandaskan Pantja Sila, UUD 1945 dan yang secara legalitas mempunyai rincian idiil dan operasional dalam ketetapan-ketetapan MPRS dalam Sidang Umum ke-IV tahun 1966". Lihat: Khalid Novianto. (2012). *Pemikiran Politik dan Ekonomi Awal Orde Baru*. Dalam Susanto Zuhdi. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT. Ichtisar Baru van Hoeve, hlm. 116.

Secara konstitusional, Indonesia menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi. Namun, pada era Orde Baru, terjadi kontradiksi antara jaminan konstitusi dengan praktik pemerintah yang otoriter.⁷ Pemerintah secara sistematis mengendalikan dan membatasi kebebasan pers serta mengubah peran pers dari pengawas kekuasaan menjadi alat propaganda pemerintah. Pers yang seharusnya independen dan berfungsi sebagai *watchdog* justru dipergunakan sebagai corong negara untuk membentuk narasi publik yang menguntungkan pemerintah Orde Baru.⁸ Akibatnya, tercipta lingkungan yang tidak demokratis, di mana masyarakat mengalami kesulitan dalam mengembangkan pemikiran kritis karena informasi yang tersedia telah mengalami sensor yang ketat dan sistematis.⁹ Dengan demikian, meskipun konstitusi menjamin prinsip-prinsip demokrasi, praktik pemerintah Orde Baru justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, khususnya dalam hal kebebasan pers.

Pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem kontrol pers yang terstruktur melalui tiga mekanisme utama. Pertama, monopoli kelembagaan dengan menjadikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi tunggal.¹⁰ Kedua, regulasi birokratis melalui kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sejak tahun 1982 oleh Departemen Penerangan, yang menciptakan iklim intimidasi melalui prosedur kompleks dan ancaman pencabutan izin.¹¹ Ketiga, intervensi langsung melalui “budaya telepon”¹² dimana pejabat pemerintahan Orde Baru menentukan agenda pemberitaan. Sistem kontrol ini menghasilkan dampak struktural yang signifikan. Di satu sisi, berkembangnya budaya swasensor di kalangan wartawan sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman pembredelan. Di sisi lain, ruang gerak jurnalisme investigatif menjadi sangat terbatas akibat berbagai pembatasan redaksional. Kondisi ini mengakibatkan pergeseran fungsi pers dari alat kontrol sosial menjadi instrumen hegemoni negara, sebagaimana dianalisis oleh Hill (2006) yang menegaskan peran SIUPP sebagai alat depolitisasi media massa.¹³

⁷ A. Rachmadi. (1990). *Perbandingan Sistem Pers. Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm.31.

⁸ Pradhana, G.A, Syed, M.A.B.M., & Adnan, H.B.M. (2004). *The Challenges of Debureaucratization Televisi Republik Indonesia. Media Asia*, 51(3), 378–397. <https://doi.org/10.1080/01296612.2023.2298115>

⁹ F. Rachmadi. (1990). *Perbandingan Sistem Pers. Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm.31. Praktik yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap pers di Indonesia saat itu lebih menggambarkan praktik di negara-negara otoriter dari pada negara demokrasi. Dalam sistem otoriter, media massa berfungsi menunjang negara dan pemerintahan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Akibatnya sistem media massa sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah. Lihat: *Ibid*, hlm. 31.

¹⁰ PWI dijadikan wadah tunggal organisasi kewartawanan di Indonesia sejak 1975. Hal ini ditetapkan oleh Menteri Penerangan Mashuri, S.H., dengan Surat Keputusan No. 47/KEP/MENPEN/1975. Keputusan ini dikeluarkan tak lama berselang dari pembredelan 1974, di mana pemerintah Orde Baru membredel pers-pers yang kritis terhadap pemerintah. Sehingga untuk melancarkan “pengontrolan” pemerintah terhadap pers maka pemerintah menjadikan PWI sebagai perpanjangan tangannya. Lihat juga Ismet Rauf. (2018). *Perjalanan Panjang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)*. Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), hlm. 115.

¹¹ Krisna Harahap. (2003). *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Bandung: PT. Grafiti.

¹² “Budaya Telepon” adalah tekanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wartawan untuk menaikkan atau tidak menaikkan berita dalam media yang mereka kelola. Perintah tersebut dilakukan pemerintah dengan menelepon pimpinan redaksi. Hal ini membuat wartawan tidak berkutik dan akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Wawancara Dasman Djamaludin. Pada 18 Januari 2023. Di Laboratorium Sejarah FIB UI.

¹³ David T. Hill. (2006). *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia, hlm. 48.

Selama 32 tahun berkuasa, Orde Baru secara sistematis memanfaatkan pembredelan pers sebagai instrumen kontrol politik. Pola represif ini telah dimulai sejak awal kekuasaan Orde Baru dengan penutupan media-media kritis pada tahun 1966, kemudian semakin intensif pasca Peristiwa Malari 1974 dimana beberapa media dituding memprovokasi aksi massa melalui pemberitaan mereka.¹⁴ Eskalasi represi mencapai puncaknya pada tahun 1994 dengan pembredelan tiga media terkemuka yaitu *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*.¹⁵ Sebagaimana dianalisis Crouch (1979), strategi pembredelan ini merupakan karakteristik pemerintahan otoriter dalam menciptakan “budaya takut” (*culture of fear*)¹⁶ di kalangan jurnalis. Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah mempertahankan kontrol ketat terhadap dunia pers sepanjang masa kekuasaannya. Analisis ini mengungkap bagaimana pemerintahan otoriter menggunakan instrumen hukum dan kekuasaan negara untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan pers.

Pemerintah Orde Baru meringkai pembredelan pers sebagai upaya menjaga stabilitas nasional,¹⁷ namun dalam perspektif jurnalis dan masyarakat sipil, tindakan ini merupakan pelanggaran konstitusional terhadap kebebasan pers.¹⁸ Dampak dari kebijakan ini menciptakan dinamika politik yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah berhasil mengkonsolidasikan kontrol informasi, namun di sisi lain memicu resistensi di kalangan jurnalis. Pembredelan tiga media pada 1994 menjadi momentum penting yang melahirkan gerakan jurnalis independen pertama di Indonesia. Perlawanan ini mencapai bentuk kelembagaannya melalui pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi tetapi juga

¹⁴ Satrio Arismunandar. (2000). “Dinamika Pers Indonesia di Era Reformasi”. Dalam Dedy N. Hidayat. (2000). *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 206.

¹⁵ Pembredelan pertama dilakukan Orde Baru pada tahun 1966 di mana Orde Baru membredel media massa yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ada sekitar 36 media massa yang dibredel (Ahmad Zaini Abar dalam *1996-1974: Kisah Per Indonesia*, LKIS, 1995). Pembredelan kedua dilakukan tahun 1973 dimana Sinar Harapan dibredel karena dianggap membocorkan rahasia negara. Pada edisi 30 Desember 1972, Sinar Harapan menerbitkan RAPBN 1973/1974 sebelum dibacakan resmi oleh Soeharto di depan sidang paripurna DPR. Hal tersebut membuat Soeharto marah besar (Purwadi Djunaedi, Imran Hasibuan, Hasudungan Sirait. (2009). *Jurnalisme Investigatif*. Jakarta: Q Communication, hlm.144.). Pembredelan ketiga yaitu pembredelan besar-besaran. Pemicunya adalah demonstrasi mahasiswa anti-Jepang yang kemudian diwarnai oleh adanya sejumlah pembakaran. Peristiwa ini dikenal dengan Malari 1974. *Indonesia Raya, Suluh Indonesia, Harian Nusantara, Mahasiswa Indonesia, Harian Kami, Abadi, The Jakarta Times, Wenang dan Pemuda Indonesia*. Koran-koran itu dianggap menurunkan berita yang dapat menghasut rakyat untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara (David T. Hill. (2011). *Pers di Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia). Pembredelan keempat terjadi tahun 1978. Pemicunya adalah pemberitaan aksi mahasiswa Bandung yang menolak Soeharto sebagai presiden. Pemerintah menjerat media-media itu dengan delik penyiaran berita bohong. Koran-koran yang dibredel: *Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Peliti, The Indonesia Times, Sinar Pagi dan Pos Sore* (Lukas Luwarso, *Pers Indonesia, Pergulatan untuk Kebebasan*, 31 Agustus 2000). Kelima pembredelan terhadap Sinar Harapan. Keenam pembredelan terhadap Harian Prioritas. Ketujuh Pembredelan terhadap Monitor dan kedelapan Pembredelan tahun 1994 dimana *Tempo, Detik* dan *Editor* dicabut SIUPP nya oleh Departemen Penerangan. Penjelasan lebih terperinci tentang pembredelan-pembredelan pada masa Orde Baru akan dibahas dalam Bab 2.

¹⁶ Harold Crouch. “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia”. *Worlds Poilitics*, Volume 31, Issue 4, July 1979, pp. 571-587. <https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/abs/patrimonialism-and-military-rule-in-indonesia/CB86F76CCE18661F1DB69A848BE2F075>.

¹⁷ Dedy N. Hidayat. (2000). *Pers dalam Revolusi Mei. Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., hlm. 121-122. Lihat juga: *Pers Indonesia*. No. 14 Tahun Ke IV. April 1978., hlm. 5.

¹⁸ Andreas Harsono. (1995). *Wartawan Independen. Sebuah Pertanggungjawaban AJI*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

berkembang menjadi aktor politik dengan memanfaatkan jurnalisme sebagai medium perlawanan terhadap struktur kekuasaan Orde Baru.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dideklarasikan pada 7 Agustus 1994 melalui Deklarasi Sirnagalih yang ditandatangani di Wisma *Tempo*, Bogor.¹⁹ Pendirian organisasi ini tidak hanya melibatkan kalangan jurnalis, tetapi juga mendapat dukungan dari akademisi, mahasiswa, seniman, dan masyarakat pro-demokrasi.²⁰ Hal ini menunjukkan sifat gerakan AJI yang inklusif dan multidisipliner. Deklarasi tersebut menegaskan empat prinsip dasar. Pertama, penolakan terhadap segala bentuk intimidasi dan pembatasan kebebasan pers. Kedua, perlawanan terhadap monopoli informasi oleh negara. Ketiga, penolakan terhadap sistem organisasi wartawan tunggal PWI. Keempat, komitmen untuk menjadikan AJI sebagai wadah perjuangan kebebasan pers.²¹ Prinsip-prinsip ini dirumuskan oleh kelompok jurnalis muda dari berbagai media terkemuka, termasuk Dhia Prakesha Yoedha dan Satrio Arismunandar (*Kompas*), Tosca Santoso (*Forum Keadilan*), Akhmad Taufik (*Tempo*), Dadang RHS (*Detik*) dan sejumlah jurnalis lainnya dari berbagai media. Untuk memperkuat legitimasi dan dampak gerakan, deklarasi ini juga ditandatangani oleh tokoh-tokoh jurnalis senior seperti Goenawan Mohamad, Fikri Jufri dan Bambang Harymurti (*Tempo*), Eros Djarot (*Detik*), serta melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya seperti Aristides Katoppo, Christianto Wibisono, dan Arif Budiman.²² Keterlibatan berbagai elemen ini menunjukkan bahwa AJI sejak awal telah menjadi gerakan kolektif yang melampaui batas-batas profesi jurnalistik semata.

Pendirian AJI pada 1994 berperan sebagai katalis penting dalam transformasi sistem pers Indonesia dan struktur Orde Baru yang otoriter menuju tata kelola media yang demokratis (Romano, 2003; Susanto, 2010). Keberadaan AJI merepresentasikan respons konkret terhadap aspirasi jurnalis yang selama puluhan tahun mengalami represi negara, sekaligus mewujudkan idealisme pers sebagai institusi independen yang bebas dari intervensi kekuasaan. Berdirinya AJI tidak sekadar menandai resistensi terhadap kontrol negara atas pers, melainkan menghadirkan inovasi penting dalam ekosistem pers Indonesia melalui penerbitan majalah *Independen*. Media ini dipilih sebagai saluran perjuangan AJI karena kemampuannya menyampaikan wacana kritis yang terhalang di media arus utama yang dikendalikan negara. Kehadiran *Independen* menciptakan ruang publik alternatif (*counter-public sphere*) yang signifikan, memberikan akses informasi independen bagi masyarakat.²³

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi AJI dalam memperjuangkan kebebasan pers Indonesia periode 1994-1999 dengan menggunakan kerangka teori strukturasi Anthony Giddens (1984).²⁴ Studi ini berangkat dari premis bahwa media merupakan arena sosial tempat berlangsungnya dialektika antara struktur dan agensi. Dalam perspektif ini, struktur mencakup dimensi aturan (*rules*) berupa regulasi formal seperti UU Pers dan norma informal seperti etika jurnalistik, serta sumber daya (*resources*) meliputi modal ekonomi, jaringan, dan akses

¹⁹ Abdul Manan. (2014). *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, hlm. 83.

²⁰ Penjelasan mengenai siapa saja yang hadir dan ikut membidani lahirnya AJI akan dibahas di Bab 3.

²¹ Ayu Utami, dkk. (1994). *Bredel 1994*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, hlm. 122-123.

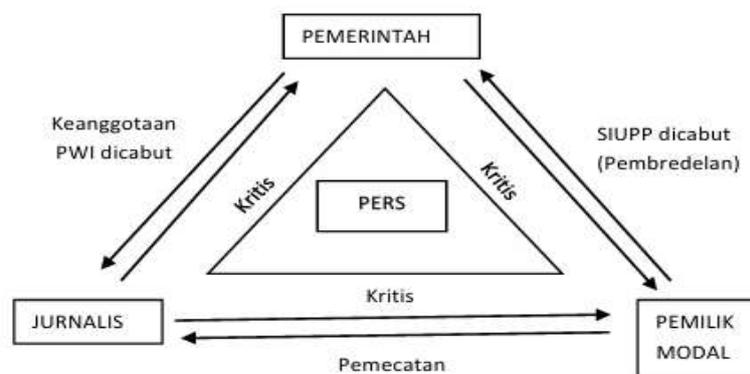
²² Tokoh-tokoh pendiri AJI lebih lengkapnya lihat lampiran 1.

²³ Denis McQuail. (2010) *McQuail Mass Communication Theory*. London: Sage, hlm. 223.

²⁴ Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press, hlm. 17.

informasi yang membentuk relasi kekuasaan antara negara, pemilik media, dan praktisi pers.²⁵ Sementara agensi direpresentasikan oleh kapasitas AJI sebagai aktor kolektif untuk melakukan tindakan transformatif melalui strategi advokasi, pembangunan jaringan alternatif, dan perlawanan kultural terhadap struktur pers Orde Baru yang represif. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana memobilisasi sumber daya dan relasi untuk mendekonstruksi sistem pers otoriter, serta menganalisis dampak strategi agensi mereka terhadap perubahan regulasi dan praktik jurnalistik pasca reformasi 1998. Signifikansi studi terletak pada kontribusi teoritis dalam memahami dinamika perubahan media di negara otoriter melalui lensa interaksi antara struktur dan agensi, sekaligus memberikan perspektif kritis tentang peran organisasi jurnalis dalam proses demokratisasi.

Teori komunikasi modern (McQuail, 2010:102) mengonseptualisasikan kekuatan media sebagai fenomena multidimensional yang termanifestasi dalam dua dimensi kunci. Dimensi pertama, merujuk pada konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1996)²⁶, menegaskan kapasitas media dalam membentuk realitas sosial melalui proses *framing* dan agenda *setting* yang mempengaruhi persepsi individu maupun kolektif. Dimensi kedua, melalui lensa ekonomi politik media Herman dan Chomsky (2002)²⁷, mengungkapkan relasi kuasa dalam produksi informasi dimana media beroperasi sebagai aparatus ideologis yang teregulasi oleh struktur kekuasaan dominan. Konteks Indonesia mengilustrasikan dialektika ini melalui polarisasi antara kontrol pemerintah Orde Baru dengan resistensi AJI sebagai *counter hegemony*. Dinamika ini secara teoritis mengkonfirmasi proposisi dasar strukturasi Giddens (1984) tentang independensi antara agensi (AJI sebagai aktor kolektif), Struktur (pers era Orde Baru), dan praktik sosial (perjuangan kebebasan pers). Visualisasi relasi antar ketiga hal tersebut dapat diamati pada gambar di bawah ini yang memetakan interaksi kompleks antara ketiga unsur tersebut.



Gambar 1.1: Skema Interaksi Aktor-Aktor Dalam Dunia Pers di Indonesia Era Orde Baru
 Sumber: Pemetaan pemikiran penulis (Raisye)

Gambar di atas mengilustrasikan dialektika tiga aktor utama dalam dunia pers yaitu pemerintah sebagai regulator yang berorientasi pada stabilitas nasional, pemilik modal dengan kepentingan komersial, dan jurnalis yang memperjuangkan idealisme profesi serta

²⁵ Anthony Giddens. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁶ Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality*. Anchor Books.

²⁷ Edward S. Herman & Noam Chomsky (2002). *Manufacturing Consent*. Pantheon Books.

kesejahteraan. Interaksi ketiganya membentuk medan pertarungan (*force field*) antara kontrol politik, logika pasar, dan otonomi jurnalistik. Dalam konteks Orde Baru, hegemoni negara mendominasi melalui represi struktural, sementara pasca reformasi terjadi rekonfigurasi kekuatan yang memungkinkan ruang lebih luas bagi agensi jurnalis, sebagaimana tercermin dalam peran AJI sebagai *counter hegemony*. Relasi ketiga unsur tersebut mengkonfirmasi proposisi Giddens (1984) tentang strukturasi, di mana praktik sosial media terbentuk melalui negosiasi terus-menerus antara determinasi struktural dan kapasitas agensi untuk melakukan perubahan.

Dari latar belakang di atas, muncul rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana AJI berperan dalam memperjuangkan hak kebebasan pers dan meletakkan fondasi utama bagi terwujudnya jurnalisme independen di Indonesia pada periode 1994-1999? Permasalahan utama penelitian tersebut kemudian dijabarkan dengan tiga pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya AJI dan siapakah aktor-aktor yang menggerakkannya?
2. Strategi apa saja yang diterapkan AJI untuk melawan represi negara dan memperjuangkan pers independen?
3. Apa dampak perjuangan AJI terhadap perkembangan kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia?

Metode dan Sumber Penelitian

Studi ini mengkaji perjuangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam memperjuangkan kebebasan pers era Orde Baru dengan menggunakan metode sejarah. Sebagai penelitian sejarah, kajian ini merekonstruksi secara kritis upaya-upaya perlawanan jurnalis terhadap represi negara dengan menggunakan metode sejarah, yang meliputi empat tahapan utama yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1985: 32). Tahap heuristik meliputi pengumpulan sumber primer di perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Museum Pers Solo, arsip digital dari situs pemerintah serta arsip organisasi AJI dan majalah *Suara Independen* diperoleh dari para aktivis AJI. Selanjutnya pengumpulan sumber sekunder dilakukan di perpustakaan Universitas Indonesia dan beberapa tempat buku loak di Jakarta dan Solo. Pengumpulan data dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap pelaku sejarah, termasuk pendiri AJI baik melalui *Focus Group Discussion* (FGD) maupun wawancara individual. Proses kritik sumber dilakukan secara ketat terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber, baik melalui kritik ekstern maupun intern. Tahap interpretasi dan historiografi kemudian menyusun fakta secara analitis dengan pendekatan multidisipliner, menggabungkan perspektif sejarah, ilmu politik, dan kajian media dalam kerangka teori strukturasi Giddens.

Kerangka Teori dan Metodologi

Kajian ini menempatkan AJI sebagai *agency* dalam gerakan sosial, mengingat peranannya yang tidak hanya terbatas sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai aktor yang aktif

memperjuangkan kebebasan pers, demokrasi dan perubahan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert Mirsel, studi tentang relasi media massa dengan gerakan sosial telah semakin berkembang sejak 1970-an,²⁸ menunjukkan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagaimana penyimpan informasi, tetapi juga sebagai instrumen perlawanan terhadap struktur dominan. Secara teoritis, gerakan sosial didefinisikan sebagai gerakan yang merujuk pada setiap organisasi yang menentang tatanan dominan seraya mengajukan tatanan struktural alternatif.²⁹ Studi tentang perlawanan jurnalis, khususnya pada masa Orde Baru, menampilkan bagaimana AJI berfungsi sebagai *agent of change* yang aktif melawan kontrol negara atas media. Sebagai organisasi jurnalis, AJI tidak hanya menolak pembatasan kebebasan pers, tetapi juga membangun jaringan tandingan dan narasi alternatif yang mendorong transformasi sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis integratif yang memadukan tiga perspektif kunci. Pertama, teori strukturasi Giddens (1984)³⁰ memberikan lensa analitis untuk mengkaji dialektika antara AJI dan struktur kekuasaan Orde Baru. Konsep dualitas struktur Giddens memungkinkan untuk dapat memahami bagaimana AJI sebagai agensi berinteraksi dengan sistem struktural yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan sosial. Kedua, *political Process Theory* (McAdam, 1982; Tarrow, 1998) menawarkan kerangka untuk menganalisis bagaimana AJI memanfaatkan konteks politik selama krisis 1997-1998. Teori ini menekankan tiga komponen utama yaitu struktur kesempatan politik, kapasitas mobilisasi organisasi, dan *framing* proses kolektif. Dalam konteks AJI, krisis ekonomi dan politik menciptakan struktur kesempatan yang unik bagi perjuangan kebebasan pers. Ketiga, teori aksi kolektif Charles Tilly (1978,2006) memberikan alat analisis untuk memahami kemunculan AJI sebagai pejuang kebebasan pers. Konsep utama Tilly tentang *repertoires of contention* dan *political opportunity* structure membantu menjelaskan sebab-sebab terjadinya aksi kolektif AJI dalam konteks represi politik Orde Baru. Implikasi ketiga teori ini dalam penelitian AJI menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga politis. AJI berhasil mbingkai perjuangannya sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih luas, memanfaatkan momentum krisis politik, dan membangun kapasitas organisasi melalui jaringan alternatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika gerakan pers Indonesia pada masa transisi politik.

Menurut Stones (2005) dalam bukunya *Structuration Theory*, konsep dualitas struktur Giddens, memungkinkan agensi untuk memodifikasi aturan main yang ada. Dalam penelitian ini, AJI tidak hanya menghadapi keterbatasan struktural tetapi juga menemukan peluang transformatif dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, meskipun Orde Baru melarang pendirian organisasi profesi jurnalis di luar PWI, namun AJI tetap didirikan sebagai organisasi alternatif profesi jurnalis. Proses strukturasi dalam gerakan yang dibangun AJI dapat ditelusuri melalui tiga dimensi kunci. Pertama terkait signifikansi gerakan. AJI mbingkai perjuangannya sebagai upaya mempertahankan etika jurnalistik universal, bukan sekedar perlawanan politik. Kedua berkaitan dengan dominasi. AJI melakukan strategi pengalihan ketergantungan dari sumber daya negara ke jaringan internasional seperti International Federation Journalists (IFJ).

²⁸ Robert Mirsel. (2004). *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Insist Pres, hlm. 20.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 194.

³⁰ Anthony Giddens. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Los Angeles: University of California Press.

Ketiga, berkaitan dengan legitimasi. AJI membentuk dan mengembangkan tentang kode etik jurnalis independen tahun 1995 sebagai alternatif standar profesi wartawan.

Penelitian tentang AJI dapat pula dibedah dengan menggunakan *Political Process Theory* (McAdam, 1982; Tarrow, 1998) yang menawarkan kerangka analitis yang tepat untuk memahami bagaimana AJI memanfaatkan konteks politik selama krisis 1997-1998 untuk memperjuangkan agenda kebebasan pers. Teori ini menekankan pada tiga komponen utama yang menentukan keberhasilan gerakan sosial: (1) struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), (2) kapasitas mobilisasi organisasi, dan (3) *framing* proses kolektif. Dalam konteks AJI, krisis ekonomi dan politik 1997-1998 menciptakan struktur kesempatan yang unik, di mana melemahnya legitimasi Orde Baru membuka ruang bagi aktor-aktor pro demokrasi, termasuk AJI, untuk memperkuat perjuangannya.

Munculnya AJI sebagai respons terhadap sikap pemerintah Orde Baru yang represif dapat dikategorisasikan sebagai gerakan sosial. Sebagaimana diungkapkan C. Behan McCullagh bahwa tindakan perlawanan merupakan respons ketidakadilan.³¹ Secara sederhana gerakan sosial dapat diartikan sebagai upaya kolektif untuk mewujudkan suatu kepentingan bersama atau sebuah gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan atau gerakan kolektif di luar lembaga-lembaga yang telah mapan.³² Kemunculan gerakan sosial sering diawali oleh adanya ketidakpuasan terhadap norma-norma yang berlaku, ketidakadilan struktur sosial, kondisi politik yang menindas, ekonomi yang eksploitatif, diskriminasi kelompok terhadap minoritas tertentu dan penggunaan perspektif dan ideologi yang berbeda-beda.³³

Dalam studi ini gerakan sosial yang dimaksud didasarkan pada definisi Tarrow (1994) yang penulis anggap cocok dengan pendekatan gerakan sosial yang penulis pilih. Menurut Tarrow (1994), yang mendasarkan pengertiannya pada tulisan Charles Tilly, gerakan sosial adalah “tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan elite, lawan, dan penguasa”.³⁴ Tarrow melakukan elaborasi terhadap definisi tersebut dengan menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut (a) menyusun aksi gerakan (*disruptive*) melawan kelompok elite, penguasa, kelompok-kelompok lain, dan aturan-aturan budaya tertentu, (b) dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite, (c) berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif; dan (d) terus melanjutkan sampai menjadi sebuah gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan sosial diikuti oleh sejumlah individu yang memiliki tujuan dan identitas kolektif yang sama, yang secara bersama-sama terlibat dalam aksi kolektif yang memiliki tujuan tertentu.

Secara spesifik, AJI memanfaatkan beberapa dimensi kesempatan politik yang diidentifikasi dalam teori ini (Tarrow, 1998:76-80). Pertama, keterbukaan akses ke sistem politik terjadi ketika Orde Baru mulai kehilangan kontrol akibat tekanan krisis ekonomi dan protes mahasiswa. Kedua, ketidakstabilan aliansi elite tampak dari perpecahan di tubuh ABRI dan Golkar, di mana beberapa fraksi mulai bersimpati pada tuntutan reformasi. Ketiga, adanya

³¹ C. Behan McCullagh. (1998). *The Truth of History*. London and New York: Routledge, hlm. 242.

³² Fadillah Putra, dkk. (2006). *Gerakan Sosial*. Malang: Averroes Press, hlm. 3.

³³ Manalu Dimpoz. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 98.

³⁴ Sidney Tarrow. (1994). *Power in Movement. Social Movement, Collective Action and Mass Politics in the Modern State*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 4.

sekutu berpengaruh di legislatif (seperti Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais) memberikan ruang bagi AJI untuk mengadvokasi perubahan UU Pers. Keempat, melemahkan kapasitas represif negara memungkinkan AJI mengintensifkan kegiatannya yang sebelumnya dilakukan secara bawah tanah.

Dari perspektif mobilisasi sumber daya, AJI menunjukkan kapasitas organisasi yang matang dengan memanfaatkan jaringan yang telah dibangun sejak 1994. Menurut McAdam (1982:40-45), efektivitas gerakan sosial ditentukan oleh kemampuan mengkonsolidasikan sumber daya material (pendanaan untuk pelatihan dan publikasi), jaringan sosial (aliansi dengan LSM dan Kampus), dan pengetahuan teknis (keterampilan jurnalistik). AJI membuktikan ketiga elemen ini melalui penerbitan media alternatif (*Suara Independen*), pelatihan jurnalis, dan lobi politik yang terkoordinasi.

Aspek *framing* dalam teori ini membantu memahami bagaimana AJI membingkai perjuangannya sebagai bagian dari agenda reformasi yang lebih luas. Melalui konsep *collective action framing* (Snow et al., 1986), AJI berhasil menghubungkan isu kebebasan pers dengan tuntutan demokratisasi yang lebih umum, sehingga memperluas basis dukungan sosial. *Framing* ini efektif karena memanfaatkan momentum krisis untuk menunjukkan hubungan antara represi pers dengan kegagalan sistem politik Orde Baru.

Teori Aksi kolektif Charles Tilly (1978, 2006) sangat relevan untuk menganalisis kemunculan AJI sebagai pejuang kebebasan pers di era Orde Baru. konsep utama Tilly tentang *repertoires of contention* dan *political opportunity structure* memberikan kerangka yang tepat untuk memahami sebab-sebab terjadinya aksi kolektif AJI dalam konteks represi politik Orde Baru. Menurut Tilly, ada 5 (lima) komponen penting yang berkaitan dengan terjadinya aksi kolektif yaitu *interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action*.³⁵

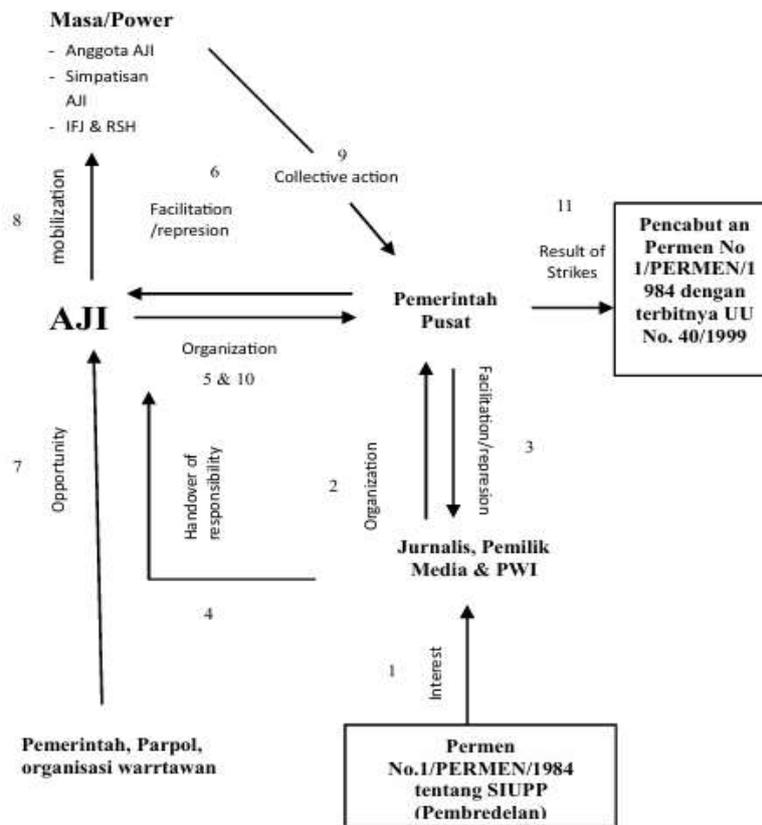
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Tilly. Aksi kolektif mobilisasi ini mempunyai tiga elemen utama yaitu:³⁶

1. *Power*, yaitu kesatuan kekuatan politik kelompok tertentu yang mengacu pada hasil interaksi dengan pemerintah.
2. *Repression/facilitation*, yaitu represi politik dan fasilitasi politik bagi hubungan antara kelompok dan pemerintah.
3. *Opportunity/Threat*, yaitu sejauh mana kelompok-kelompok lain, termasuk pemerintah memberikan kemungkinan peluang atau sebaliknya, memberikan ancaman.

Adapun implementasi dari teori aksi kolektif model mobilisasi ke dalam kasus AJI dalam memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia dapat dilihat pada di bawah ini:

³⁵ Charles Tilly. (1978). *From Mobilization to Revolution*. California: Addison-Wesley Publishing Company, hlm. 182.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 54—56.



Gambar 1.2: Skema Interaksi Aktor-Aktor dalam Dunia Pers di Indonesia Era Orde Baru

Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No.1 tahun 1984 tentang kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) telah memicu timbulnya keresahan para jurnalis dan pemilik media. Bagi pemilik media SIUPP adalah sebuah ancaman karena mereka selalu dibayang-bayangi oleh pencabutan SIUPP (pembredelan) apabila informasi yang mereka tampilkan di media tidak selaras dengan keinginan pemerintah. Begitu pun bagi jurnalis, SIUPP merupakan penghambat bagi mereka untuk bekerja secara profesional. Dalam kasus AJI, Permen tersebut diterapkan dengan tindakan pemerintah yang membredel *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* pada 21 Juni 1994. Setelah Pembredelan itu terjadi, para jurnalis mencari solusi atas keresahan yang timbul (nomor 1 *interest*), mereka menyampaikan keluhan atau kepentingan mereka kepada organisasi yang menaungi mereka yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), satu-satunya organisasi wartawan yang diakui negara (nomor 2 *organization*). Namun, PWI tidak menanggapi keluhan para jurnalis. PWI lebih memilih untuk memahami atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut (nomor 3 *facilitation/repression*). Hal ini jelas membuat para jurnalis kecewa. Para jurnalis merasa bahwa satu-satunya organisasi yang mewedahi jurnalis tidak bisa diharapkan untuk membela kepentingan jurnalis maka akhirnya mereka mendirikan organisasi alternatif yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (nomor 4 *handover of responsibility*).

Para jurnalis yang akhirnya mendirikan AJI melakukan berbagai macam konsolidasi dengan perkumpulan-perkumpulan jurnalis di daerah, seperti Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Seraya melakukan pengorganisasian (nomor 5 *organization*). Para jurnalis juga

mendatangi pemerintah pusat untuk melakukan perundingan supaya aspirasi para jurnalis dapat didengarkan. Pemerintah pusat melalui Departemen Penerangan memberikan kesempatan kepada para jurnalis dan mereka berjanji akan menyampaikan tuntutan jurnalis kepada Menteri Penerangan, Harmoko. Dan mereka berjanji akan memberikan solusi maksimal sebulan kemudian. Namun, hal di atas berakhir dengan *deadlock* (nomor 6 *facilitation*).

Setelah negosiasi menemukan jalan buntu, kemudian para jurnalis (cikal bakal pendiri AJI) melakukan mobilisasi terhadap para jurnalis lainnya melalui pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, tulisan-tulisan, pengumuman-pengumuman, wawancara para tokoh pro-demokrasi, dan pengumpulan massa (nomor 7 *mobilization*). Mobilisasi para jurnalis semakin kuat karena mendapat banyak peluang dan dukungan dari berbagai pihak seperti akademisi, budayawan, politisi, dan dukungan organisasi jurnalis internasional (nomor 8 *opportunity*).

Di samping pemerintah memberikan fasilitas kepada para jurnalis dalam upaya menyelesaikan tuntutan yang berupa kesempatan untuk melakukan perundingan, sebaliknya pemerintah juga melakukan tindakan pengeledahan dan penangkapan terhadap 2 orang anggota AJI dan 1 simpatisan AJI. Tindakan pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan represif (nomor 6 *repression*) terhadap AJI. Tindakan represi tersebut tidak menjadi penghalang bagi AJI tetapi justru dimanfaatkan menjadi peluang baru. AJI mengangkatnya menjadi isu bahwa pemerintah bertindak otoriter dengan cara represif terhadap rakyat dan melanggar hak-hak berdemokrasi. Isu tersebut diangkat ke permukaan untuk mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak. Upaya yang dilakukan AJI mendapat dukungan luas dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional, yang pada dasarnya mereka tidak setuju terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Luasnya dukungan yang berasal dari nasional dan internasional, serta *power* yang dimiliki AJI yaitu berupa kader-kader militan yang berada di media-media nasional dan internasional serta dukungan politisi yang berada di lingkaran pemerintahan semakin memperkuat mobilisasi yang dilakukan oleh AJI. Berbagai intimidasi terhadap anggota dan simpatisan AJI berupa teror, pemecatan keanggotaan PWI, pemutusan hubungan kerja (PKH), hingga dipenjara tidak mampu melemahkan semangat AJI. Namun sebaliknya, tindakan represif pemerintah menjadi peluang baru bagi AJI untuk terus melancarkan aksi-aksi kolektif lainnya (nomor 9 *collective action*). Aksi kolektif ini ditandai dengan adanya kesamaan tujuan anggota AJI untuk melawan tindakan represif, memperjuangkan independensi jurnalistik, dan mendorong reformasi sistem pers yang demokratis.

Pembredelan yang terjadi 21 Juni 1994, di mana *Tempo*, *Detik* dan *Editor* dicabut SIUPP nya, memicu protes para jurnalis dengan melakukan berbagai aksi. Para jurnalis membangun jaringan dan koordinasi untuk menyamakan persepsi, menyatukan tujuan sehingga aksi-aksi yang dilakukan merupakan aksi dengan identitas dan tujuan yang sama. Selain itu, AJI mengorganisir diskusi publik, membangun jaringan dengan aktivis demokrasi serta lembaga seperti LBH Pers, serta menerbitkan *Suara Independen* sebagai bentuk perlawanan terhadap sensor. Sehingga dengan demikian, AJI memperkuat posisinya sebagai gerakan jurnalis yang terorganisir.

Deklarasi Sirnagalih yang dilaksanakan pada 7 Agustus 1994 semakin menegaskan karakter dari aksi kolektif yang dilakukan para jurnalis. Meski awalnya AJI bergerak semi-bawah tanah akibat tekanan penguasa, namun AJI berhasil membangun sistem distribusi informasi independen dan menyelenggarakan berbagai pelatihan jurnalistik untuk

mempertahankan keberlanjutan pers yang kritis. Kolaborasi dengan organisasi internasional seperti Reporter Without Borders (RSF) dan International Federation of Journalists (IFJ) juga memperluas tekanan global terhadap pemerintahan Orde Baru. Pasca keruntuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, AJI terlibat aktif dalam proses reformasi hukum pers dengan menyusun dan mengadvokasi draf UU Pers yang lebih demokratis. Upaya kolektif ini, bersama Dewan Pers dan komunitas jurnalis, akhirnya berhasil mendorong lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menghapus penyensoran, melindungi hak jawab, dan mengubah sistem perizinan media dari lisensi pemerintah ke verifikasi mandiri (nomor 11 *Result of stickers*).

Dengan demikian, AJI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang melakukan aksi kolektif mulai dari perlawanan bawah tanah, pembentukan media alternatif, advokasi hukum, hingga mendorong lahirnya UU No.40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers menjadi bukti konkrit bagaimana aksi kolektif jurnalis mampu menciptakan perubahan struktur, membuka ruang kebebasan pers, dan menjadi fondasi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi.

Berkaitan dengan aksi kolektif, Charles Tilly dalam bukunya *The Politics of Collective Violence* (2003), membagi aksi tersebut menjadi 2 aksi yaitu aksi kolektif tanpa kekerasan dan aksi kolektif dengan kekerasan.³⁷ Khusus mengenai aksi kolektif dengan kekerasan, ia menyebutkan faktor penyebabnya adalah ketidakadilan dan intensitas kekerasan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya Tilly membagi aksi kolektif dengan kekerasan kedalam tiga kategori, maka dalam bukunya ini Tilly membaginya dalam tujuh jenis aksi kolektif, yaitu kekerasan yang berulang (*violent rituals*), Kekerasan yang dikendalikan (*coordinated destructions*), kesempatan yang terlarang (*opportunity*), persahabatan yang berakhir rusak (*brawls*), perkelahian individu (*individual aggression*), serangan yang berulang-ulang dan terpencar (*scattered attack*), dan kesepakatan yang batal (*broken negotiations*).³⁸

Dalam peristiwa aksi kolektif jurnalis yang di akhir masa pemerintahan Orde Baru, pihak yang dilawan oleh para jurnalis sebenarnya bukan hanya PWI, tetapi juga Departemen Penerangan dan aparat pemerintah yang menjadi bagian dari struktur yang menyebabkan adanya aturan yang mengekang pers dalam menyampaikan informasi (mengenai bab ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab III). Dari data yang berhasil dihimpun, menunjukkan bahwa yang disebut “gerakan demonstrasi” atau “pembangkangan pers (subversif)” oleh para jurnalis, pada dasarnya merupakan aksi-aksi perlawanan, baik secara individual maupun kolektif terhadap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dan Lembaga-lembaga perpanjangan kaki dan tangannya pemerintah.

Para Jurnalis memandang struktur pers, terutama di akhir era kekuasaan Orde Baru, khususnya norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia karena tidak membawa harapan adanya kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Struktur yang diciptakan Orde Baru dalam kehidupan pers, yang *notabene* telah diatur sedemikian rupa sehingga kekerasan Orde Baru terhadap pers dimodifikasi sebagai tindakan yang terkesan legal dan semestinya dilakukan, telah menenggelamkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.

³⁷ Charles Tilly. (1978). *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley Publishing Company; Charles Tilly. (2003). *The Politics of Collective Action*. Cambridge-New York: Cambridge University Press.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 143-148 dan Tilly. (2003). *Op. cit.*, hlm. 14-16.

Salah satu bentuk aksi kolektif dengan kekerasan (*collective violence*) yang bersifat menyerang (*offensive*) dan terbuka dapat diartikan sebagai pemberontakan atau istilah lebih heroiknya disebut sebagai perlawanan. Sebagaimana telah banyak diungkapkan oleh para ahli teori dan metodologi bahwa pada umumnya kekerasan kolektif muncul dari situasi konkret yang sebelumnya didahului oleh penyebaran (*sharing*) gagasan, nilai dan tujuan berdasarkan masalah bersama dalam periode waktu yang relatif lama. Konseptualisasi masalah bersama atau lebih tepatnya interes atau minat itulah yang menjadi faktor krusial dalam suatu aksi kolektif. Sebab, dalam proses berlangsungnya aksi tersebut, aksi itu bukan saja melibatkan perasaan akan adanya bahaya, dendam atau marah, tetapi juga menjadi faktor pembentukan identitas yang diperlukan untuk menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Dalam kondisi ini tujuan serta identitas kelompok sudah terbentuk serta pihak yang menjadi sasaran atau musuh bersama juga sudah jelas, maka faktor kesempatanlah yang tinggal mereka tunggu (atau didiskusikan). Dalam kondisi semacam ini, satu saja peristiwa muncul, baik berupa provokasi dari dalam, ataupun dari luar, maka pemberontakan atau aksi kolektif yang disertai tindak kekerasan akan meledak.

Hasil Penelitian

Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap kebebasan pers melalui sensor komprehensif, baik secara formal maupun informasi, yang efektif membungkam pemberitaan kritis. Dominasi negara diperkuat oleh peran Departemen Penerangan dan PWI sebagai organisasi tunggal wartawan, sementara kepentingan bisnis pemilik media yang lebih mengutamakan hubungan baik dengan penguasa semakin memperparah kondisi. Situasi ini menciptakan lanskap jurnalistik paradoks, wartawan terjepit antara tuntutan idealisme profesional dan realitas politik represif. Akibatnya, pers mengalami disfungsi peran yang seharusnya sebagai pilar demokrasi berubah menjadi alat negara. Hal ini memicu penurunan kualitas pemberitaan akibat adanya budaya *self-censorship*.

Kondisi tersebut melahirkan kegelisahan di kalangan wartawan yang kemudian melahirkan beberapa aksi. Aksi pertama berupa sarasehan para wartawan dan editor muda pada 26 Juli 1985 yang menyoroti kondisi pers di bawah pemerintahan Orde Baru. Adapun pembicara yang hadir dalam Sarasehan tersebut diantaranya Aswab Mahasin, Masmiar Mangiang, Syahrir Wahab, Jus Soema Di Pradja, dan lain-lain. Sarasehan tersebut diinisiasi majalah *Prisma*. Forum ini menjadi ruang otokritik langka, mengungkap dilema mendasar pers Orde Baru dimana munculnya pertentangan antara idealisme jurnalistik dan kepentingan bisnis-politik. Selanjutnya para wartawan yang gelisah mengadakan pertemuan di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada awal 1990-an. TIM menjadi tempat diskusi bagi aktivis dan wartawan. Pertemuan di TIM memunculkan kesadaran akan perlunya organisasi wartawan independen sebagai alternatif dari PWI yang dianggap tidak kritis. Gagasan ini menjadi embrio lahirnya organisasi alternatif bagi wartawan di samping PWI.

Keinginan untuk mendirikan organisasi alternatif bagi wartawan mendapat momentum pasca pembredelan 1994 di mana pemerintah melakukan pembredelan terhadap *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* pada 21 Juni 1994. Pembredelan tersebut memicu mobilisasi solidaritas kolektif dalam bentuk gelombang protes di berbagai kota. Pembredelan ini menjadi katalisator gerakan

demokratisasi dan titik balik munculnya kesadaran publik terhadap represi kebebasan pers. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan represif negara dan ketidakpuasan terhadap PWI. Dalam penelitian ini, aksi solidaritas yang terjadi dapat dianalisis dengan menggunakan aksi kolektif Charles Tilly. Munculnya berbagai aksi ini akhirnya melahirkan gerakan yang lebih konkret berupa pembentukan organisasi alternatif bagi wartawan.

Terbentuknya AJI, dapat dibagi ke dalam tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan. Pasca beberapa aksi solidaritas yang merupakan upaya advokasi wartawan dengan mendatangi PWI dan lobi pemerintah terbukti tidak efektif. Hal ini memicu kesadaran untuk membentuk organisasi independen. Maka diadakanlah pertemuan dengan tajuk Silaturahmi Wartawan Independen (SWI) di Wisma *Tempo*, Sirnagalih, Bogor. Dalam pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas bentuk gerakan perlawanan. Kedua, tahap pelaksanaan. Pertemuan di Wisma Tempo menjadi momentum perlawanan terorganisir terhadap represi Orde Baru. Terjadi diskusi intens mengenai agenda, bentuk organisasi, dan perumusan deklarasi. Akhirnya ditemukan kesepakatan untuk membentuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai organisasi profesi jurnalis formal yang diambil melalui mekanisme voting. Ketiga, tahap deklarasi. Deklarasi Sirnagalih dibacakan dan ditandatangani oleh individu-individu yang berani mengambil risiko. AJI lahir sebagai tantangan terhadap PWI dan simbol perlawanan terhadap kontrol pemerintah. Deklarasi Sirnagalih menegaskan prinsip fundamental kebebasan berpendapat dan akses informasi.



Gambar 3.4: Penandatanganan Deklarasi Sirnagalih, Bogor 1994

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=gwvkZwmK7Vk>. Diunduh Sabtu, 14 Desember 2024, pukul 11.35 WIB

Sebagai alat penyebaran nilai-nilai ideologis perjuangan, AJI menerbitkan majalah *Independen*. Majalah *Independen* diterbitkan sebagai simbol perlawanan terhadap aturan SIUPP dan medium ruang publik alternatif. Majalah ini menjadi wadah bagi berita dan opini kritis terhadap pemerintahan yang tidak muncul di media *mainstream* dan opini kritis terhadap pemerintah yang tidak dapat muncul di media *mainstream*. Majalah *Independen* awalnya bermula dari buletin *FOWI* di Bandung dan akhirnya menjadi penerbitan resmi dari AJI yang pada periode selanjutnya mengalami dua kali perubahan nama yang awalnya *Independen* menjadi *Suara Independen*.

Segera setelah deklarasi pada 7 Agustus 1994, AJI secara strategis memperluas jaringan internasional untuk memperkuat legitimasi dan perlindungan bagi perjuangan kebebasan pers. Langkah awal dilakukan dengan mengunjungi Komnas HAM pada 10 Agustus 1994, di mana

delegasi AJI yang dipimpin Ahmad Taufik bertemu Baharudin Lopa.³⁹ Pertemuan tersebut menjadi pintu masuk AJI untuk memobilisasi dukungan institusional. Selanjutnya upaya internasionalisasi AJI semakin intensif ketika Satrio Arismunandar mewakili AJI dalam diskusi panel Freedom Forum di Hongkong pada 18 Agustus 1994 bertema “*Indonesia’s Press: An Uncertain Future*”. Forum yang dihadiri 40 wartawan internasional ini menjadi platform untuk memaparkan visi AJI tentang pluralisme organisasi jurnalis dan kritik terhadap monopoli PWI. Satrio menegaskan bahwa AJI tidak bersifat konfrontatif, melainkan menawarkan alternatif organisasi yang independen dan demokratis. Kehadiran AJI di forum ini menarik perhatian media internasional seperti BBC, VOA, dan South China Morning Post, memperluas pengaruh advokasinya.



Gambar 3.7: Delegasi Wartawan dalam Diskusi Internasional di Hongkong⁴⁰

Sumber: *Independen*. No.6/ 1994. 10 September 1994. Hlm. 11.

Dalam waktu singkat, AJI berhasil membangun jejaring global. Ahmad Taufik mengikuti *Information Tour* di Jerman pada September 1994, ia diwawancarai televisi ZDF tentang isu hak asasi di Timor Timur, serta bertemu pejabat Uni Eropa. Kunjungan dilanjutkan ke Inggris untuk bertemu Amnesty International dan National Union of Journalists, lalu ke Belanda untuk konferensi pers dengan Nederlandse Vereniging van Journalist (NVJ) dan perwakilan International Federation of Journalists (IFJ).⁴¹ Upaya ini tidak hanya memaparkan represi pers Orde Baru, tetapi juga menempatkan AJI sebagai bagian dari gerakan kebebasan pers global. Puncaknya, AJI resmi menjadi associate member IFJ pada 16 Oktober 1994.⁴² Keanggotaan ini memberikan legitimasi internasional sekaligus perlindungan politik bagi AJI, yang justru lebih cepat diakui dunia daripada pemerintah Indonesia. Seperti dikemukakan Satrio Arismunandar (1996), pengakuan IFJ membuktikan keselarasan perjuangan AJI dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam UUD 1945.⁴³

Seminar Pers Alternatif

Pada 1995, AJI menghadapi periode kritis sekaligus menentukan dalam perjalanan organisasinya. Tahun kedua ini menjadi ujian nyata bagi daya tahan organisasi yang masih

³⁹ “Dari Komnas HAM ke Freedom Forum.”. *FOWIMEDIA*. Edisi 49 Tahun Merdeka. No. 5/17 Agustus 1994, hlm. 4.

⁴⁰ Keterangan foto dari kanan ke kiri: Satrio Arismunandar, Fikri Jufri, Aristides Katopo, dan John Schidiovsky (direktur Freedom Forum Asia).

⁴¹ “AJI di Tiga Negara Eropa”. *Independen*. No. 7/1994. 5 Oktober 1994, hlm. 16.

⁴² Yasuo Hanazaki. (1998). *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, hlm. 166.

⁴³ Terkait dengan diterima AJI di IFJ lihat lampiran 5.

muda, dihadapkan pada berbagai bentuk represi sistematis dari pemerintah Orde Baru. Para anggota AJI mengalami intimidasi multidimensi, mulai dari tekanan ekonomi berupa pemecatan dari media tempat aktivis AJI bekerja, pengintaian oleh aparat keamanan, hingga penangkapan dan pengadilan terhadap dua aktivis AJI yaitu Ahmad Taufik dan Eko Maryadi. Serta pengadilan terhadap Danang Kukuh Wardoyo, seorang *office boy* di sekretariat AJI. Pemecatan massa anggota AJI dari keanggotaan PWI semakin mempersulit posisi organisasi AJI di kancan nasional.

Namun di tengah segala tantangan tersebut, AJI justru menuai pengakuan internasional yang signifikan. Organisasi ini resmi diterima sebagai anggota IFJ, sebuah pencapaian penting yang memberikan legitimasi global. Selain itu, Aktivis AJI dianugerahi penghargaan Rob Bakker Memorial Award atas perjuangan mereka dalam mempertahankan etika jurnalistik di tengah represi. Pengakuan internasional ini menjadi kontra-narasi penting terhadap upaya pemerintah untuk mengisolasi dan meminggirkan AJI di dalam negeri.

Tahun 1995 juga menandai transformasi strategis dalam pergerakan AJI. Dari gerakan yang semula terbuka dan vokal, organisasi ini terpaksa beralih ke pola pergerakan bawah tanah sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi yang semakin represif. Majalah *Independen* yang diterbitkan AJI akhirnya harus diedarkan secara sembunyi-sembunyi, didistribusikan melalui jaringan kampus dan LSM yang menjadi sekutu strategis. Transformasi ini tidak mengurangi semangat perlawanan AJI, melainkan justru menunjukkan kelenturan organisasi dalam menghadapi tekanan politik.

Perjalanan AJI tahun 1995 menjadi bukti nyata ketahanan sebuah organisasi sipil dalam menghadapi pemerintahan otoriter Orde Baru. Meski harus membayar mahal dengan penahanan aktivisnya dan berbagai bentuk represi lainnya, AJI berhasil mempertahankan eksistensinya sekaligus memperkuat posisinya sebagai simbol perlawanan terhadap kontrol informasi oleh negara. Pengalaman AJI ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika pers Indonesia era Orde Baru, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang strategi bertahan gerakan demokrasi di bawah tekanan otoritarianisme. Keteguhan AJI dalam periode sulit ini kelak akan menginspirasi banyak pejuang demokrasi di Indonesia, membuktikan bahwa perlawanan terhadap hegemoni negara mungkin dilakukan meski harus melalui jalan yang begitu rumit.

Dalam masa-masa sulit, AJI tetap berkomitmen terhadap perlunya sebuah alternatif dalam menghadapi pemerintahan represif Orde Baru. Untuk memperkuat gerakan, AJI menyelenggarakan Seminar Pers Alternatif pada 9 Februari 1995 di Kedai Kancil, Jakarta, bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang dirayakan pemerintah. Pemilihan tanggal ini merupakan bentuk ironi tersendiri, mengingat pers arus utama, yang sering kali bersekutu dengan penguasa, justru merayakan hari yang sama.⁴⁴

Seminar yang dihadiri sekitar 150 peserta, terutama pengelola pers mahasiswa ini, menegaskan bahwa pers alternatif lahir sebagai reaksi terhadap represi negara, termasuk mekanisme kontrol seperti SIUPP. Pembicara seperti Santoso dan Atmakusumah menjelaskan bahwa pers alternatif tidak terkait pada aturan pemerintah, mengutamakan kelayakan berita di atas intervensi politik, dan mendorong partisipasi aktif pembaca. Dengan diselenggarakannya

⁴⁴ "Seribu Wajah Pers di Bawah Pendudukan". *Independen*. No. 12/ 6 Maret 1995, hlm. 15.

seminar ini tidak hanya mempertegas peran AJI tetapi juga menjadi fondasi bagi gerakan demokratisasi melalui media independen.



Gambar 4.1: Seminar Pers Alternatif
Sumber: Bambang Bujono (1996:9)

Peristiwa Hotel Wisata

Dalam rangka memperkuat jaringan dan menegaskan kembali komitmen terhadap nilai-nilai organisasi, pada 16 Maret 1995, AJI menyelenggarakan acara halal bihalal di Hotel Wisata Internasional sebagai kamufase untuk menghindari pembubaran aparat.⁴⁵ Acara tersebut dirancang sebagai konsolidasi internal antar aktivis AJI dengan masyarakat pro demokrasi. Acara dihadiri sekitar 250 orang ini dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Sri Bintang Pamungkas, Ali Sadikin, Marsilam Simanjuntak, WS. Rendra, H.J.G. Prinoen, Asmara Nababan, dan juga Iwan Fals. Sementara itu dari kalangan diplomat yang hadir yaitu Sekretaris I dan Atase Tenaga Kerja Kedubes Amerika Serikat, Thomas Murphy, Atase Pers Kedutaan Swiss, Daniel Hunn, dan Sekertaris III Kedubes Australia, Indra Wati Mc. Sormik. Selain tokoh-tokoh di atas, acara halal bihalal ini tentunya dihadiri oleh para wartawan senior diantaranya Sori Siregar dari majalah *Forum Keadilan*. Menyusul kemudian Mayjen (Purn) Soebijakto Prawirasoebrata, mantan Gubernur Lemhanas, dan Adnan Buyung Nasution, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.⁴⁶ Namun, dibalik suasana silaturahmi, polisi menyusup dengan menyamar sebagai tamu, memotret peserta dan mengincar aktivis AJI.⁴⁷

Puncaknya terjadi saat usai acara. Ahmad Taufik (Ketua Presidium AJI), Liston P. Siregar, dan Sri Bintang Pamungkas ditarik paksa oleh intel Kapolda Metro Jaya tanpa surat penangkapan. Office Boy AJI, Danang Kukuh Wardoyo, juga ditangkap oleh aparat. Sementara itu, kantor AJI di Tanah Abang digerebek, pintunya dibuka paksa, peralatan seperti komputer dan uang disita. Eko Maryadi, yang tidak tahu situasi, ditangkap saat tiba di kantor. Polda Metro Jaya mengklaim penangkapan terkait penerbitan *Independen* tanpa SIUPP, dengan ancaman pasal 154 KUHP. Namun, AJI menolak tuduhan ini melalui konferensi pers di LBH, menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin UUD 1945. Meski kantor mereka dinonaktifkan pasca penggerebekan, AJI tetap bertahan terus melakukan perlawanan. Seperti disampaikan Santoso “Penangkapan tidak akan membunuh semangat kemandirian pers.

⁴⁵ Wawancara Santoso pada 20 Oktober 2024 melalui Zoom Meeting.

⁴⁶ “Penangkapan di Tengah Lebaran.”. *Suara Independen*. No.01/Juni 1995, hlm. 4-5.

⁴⁷ Wawancara Dhia Prekasha Yoedha pada 17 Oktober 2024 di Kafe Kaizen Heritage, Matraman, Jakarta Timur.

Peristiwa ini menjadi bukti represi negara sekaligus menjadi tantangan besar untuk AJI dalam menghadapi tekanan dari pemerintah yang semakin besar. Pasca penangkapan aktivis dan simpatisan AJI, media arus utama yang sebelumnya mengabaikan AJI tiba-tiba ramai memberitakan penangkapan. Hal ini menunjukkan ironi dalam sistem pers Orde Baru. Perlawanan AJI terus berlanjut bahkan semakin kuat dan solid, meskipun mereka harus berjuang di bawah tanah. Semakin kuatnya tekanan pemerintah yang direspons dengan semakin kuatnya perjuangan AJI, membuktikan bahwa upaya membungkam kebebasan pers justru memantik resistensi yang lebih terorganisir.



Gambar 4.2: Penangkapan Aktivis AJI di Hotel Wisata Internasional
Sumber: *Suara Independen*. No.01/Juni 1995, hlm. 5.

Majalah *Independen*: Narasi Kebebasan di Tengah Keterbatasan

Majalah *Independen* menjadi senjata utama AJI dalam memperjuangkan kebebasan selama akhir era Orde Baru (1994-1999). Diterbitkan tanpa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), majalah ini hadir sebagai alternatif kritis terhadap media arus utama yang dikontrol pemerintah. Ahmad Taufik, salah satu pendiri AJI, menegaskan bahwa *Independen* adalah bentuk perlawanan melalui kebebasan berekspresi dan jaringan solidaritas.

“Melawan, kami kaum jurnalis adalah dengan cara mempertahankan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Caranya dengan tidak takut menulis, menerbitkan, dan menunjukkan kebebasan berekspresi. Berkumpul dalam ikatan, memperkuat dalam melawan, karena di sanalah muncul jaringan dan keberanian.”⁴⁸

Selanjutnya Santoso, koordinator penerbitan *independen*, menambahkan bahwa *Independen* memungkinkan AJI mengontrol narasi tanpa terikat aturan represif SIUPP.

“Kalo demo-demo terus, lama-lama orang *capek* juga. Kalo menerbitkan majalah *Independen* kan masih bisa dalam kontrol kita. Terkait kapan mau terbit, isu-isu apa saja yang akan kita angkat, bagaimana model penulisan masih bisa kita kerjakan. Meskipun banyak kegiatan lain dari AJI, namun orang akan melihat siapa AJI itu dari majalah *Independen*. Bila media di bawah kontrol SIUPP banyak aturan yang mereka harus terapkan sehingga sulit untuk menyampaikan fakta-fakta di lapangan karena mengandung resiko yang tidak mau mereka tanggung, namun majalah *Independen* bisa menerobos Batasan itu”⁴⁹

⁴⁸ Abdul Manan. (2014). *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, hlm. 297.

⁴⁹ Wawancara dengan Santoso pada 20 Oktober 2024 melalui Zoom Meeting.

Pada Januari 1995, *Independen* menerbitkan laporan eksekutif “Harmoko, Raja Pers Kita”, mengungkap kepemilikan saham Menteri Penerangan Harmoko di 31 media arus utama, termasuk *Kompas* dan *The Jakarta Post*. Investigasi ini membuktikan praktik monopoli media dan “saham kosong” yang diberikan sebagai “upeti” untuk memperoleh SIUPP.⁵⁰ Usaha wartawan *Independen* untuk mewawancarai Harmoko ditolak dengan reaksi emosional, tetap *Independen* sudah memperoleh data kepemilikan saham Harmoko dan akhirnya dipublikasikan *Independen* dalam bentuk tabel. Hal ini berakibat pada “pemburuan” *Independen* karena jelas tabel yang ditampilkan menunjukkan konflik kepentingan.

	NEDIA	PERSEN	GRUP	SAAT PERILAIAN	KETERANGAN
1.	Pan Kato	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
2.	Teloh	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
3.	Pan Film	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
4.	Sabar	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
5.	Family	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
6.	Majalah Film	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
7.	Wartawan	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
8.	Sema	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	
9.	Aksa	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	Utara Jawa
10.	Bilik Maritim	40 %	Pan Kato	Sebelum SIUPP	Arifin Taha
11.	Ono	20 %	Graswadi	Sebelum SIUPP	
12.	Rak	20 %	Graswadi	Sebelum SIUPP	
13.	Serya	50 %	Graswadi	Sebelum SIUPP	
14.	Hajir	50 %	Graswadi	Sebelum SIUPP	
15.	Barru	5 %	Graswadi	Sebelum SIUPP	
16.	Jakarta Post	5 %		Sebelum SIUPP	
17.	Bilik Indonesia	20 %		Sebelum SIUPP	
18.	Indonesian Business Week	20 %		Sebelum SIUPP	
19.	Jurnal	-		Sebelum SIUPP	
20.	Pilih	-		Sebelum SIUPP	
21.	Sport	-		Sebelum SIUPP	
22.	Prapak	28 %		Sebelum SIUPP	
23.	Korisi	-		Sebelum SIUPP	
24.	Perihal	-		Sebelum SIUPP	
25.	Sana Pembinaan	-		Sebelum SIUPP	
26.	Edisi	-		Sebelum SIUPP	Infra-Struktur
27.	Warta	20 %	Graswadi	Sebelum SIUPP	Sialit Umarif
28.	SCTV	5 %		Sebelum SIUPP	
29.	ANTEVE	-		Sebelum SIUPP	
30.	Radio Kayamati FM	40 %		Sebelum SIUPP	
31.	PT. Radio Rikosa FM	100%		Sebelum SIUPP	

KETERANGAN:
 1/ (1) Ada saham Harmoko, tapi jendahnya tak diketahui
 2/ Setiap pemohonan SIUPP harus harus membayar pajak sekitar Rp. 250 juta, dan sekian modal 5 %

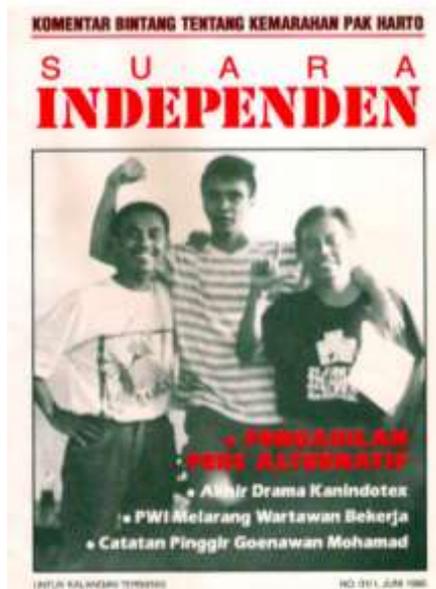
INDEPENDEN • No. 10 / 1995

Gambar 4.3: Daftar Saham-Saham Harmoko
 Sumber: *Independen* Edisi No.10/1995. 10 Januari 1994

Majalah *Independen* membuktikan bahwa kebebasan pers dapat bertahan di bawah pemerintahan otoriter, meski dengan strategi bawah tanah. Keberaniannya mengungkap korupsi elit mendorong demokratisasi menjadi fondasi bagi kebebasan pasca Reformasi. Pengalaman AJI menunjukkan bahwa perlawanan melalui jurnalisme kritis tidak hanya mungkin, tetapi juga efektif dalam menggerakkan perubahan sosial. Meskipun keberanian ini mengundang risiko dan berakhir di penjara. Setelah peristiwa Hotel Wisata Internasional,

⁵⁰ Abdul Manan. (2014). *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, hlm. 46.

majalah *Independen* tetap eksis terbit namun dengan tampilan baru dan mengubah namanya menjadi *Suara Independen*.



Gambar 4.5: Cover Pertama Pasca Perubahan Nama Majalah dari *Independen* menjadi *Suara Independen*

Sumber: *Suara Independen*. No.01/Juni 1995

Menyebarkan Ideologi Perlawanan di Arena Pengadilan

Persidangan terhadap aktivis AJI menjadi contoh nyata bagaimana pengadilan di era Orde Baru tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai medan pertarungan ideologis. Menurut teori Bourdieu, ruang hukum merupakan arena simbolik di mana negara dan aktor oposisi memperebutkan legitimasi wacana. Dalam kasus AJI, pemerintah menggunakan pasal-pasal kolonial seperti Pasal 154 KUHP tentang “penghinaan terhadap pemerintah” untuk mengkriminalisasi aktivis pers, sementara AJI memanfaatkan sidang sebagai platform untuk menyebarkan ideologi kebebasan pers.

Proses hukum terhadap Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo dimulai setelah penangkapan mereka pasca insiden Hotel Wisata pada Maret 1995. Ketiganya dituduh menerbitkan majalah *Independen* tanpa SIUPP dan “menyebarkan kebencian terhadap pemerintah” melalui artikel-artikel yang kritis. Dakwaan utama mencakup Pasal 154 KUHP (penghinaan), Pasal 134 KUHP (penghinaan residen), dan UU Pers No. 21/1982 tentang penerbitan pers tanpa izin. Namun, sidang ini justru menjadi panggung bagi AJI untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Ahmad Taufik dalam pleidoinya menegaskan bahwa perjuangan AJI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya hak berekspresi yang dijamin Pasal 28.

Persidangan ini menarik perhatian luas, dihadiri oleh diplomat asing (AS, Australia, Belanda), tokoh oposisi seperti Ali Sadikin dan Sri Bintang Pamungkas, serta wakil LSM dan LBH. Kasus AJI meninggalkan warisan penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sidang ini tidak hanya mengekspos kontradiksi sistem hukum Orde Baru yang mengklaim menjunjung konstitusi tetapi mempertahankan pasal kolonial, tetapi juga menjadi presiden bagi penggunaan

pengadilan sebagai panggung advokasi. Pleidoi AJI yang berani menginspirasi gerakan demokrasi pasca 1998, menunjukkan bagaimana aktor sipil dapat memobilisasi ruang hukum untuk melawan represi, bahkan dalam sistem yang tidak adil.



Gambar 4.12: Ahmad Taufik dan Eko Maryadi di Sidang Peradilan

Sumber: Sumber: Abdul Manan (2019:70)

Kongres Pertama AJI: Rekonstruksi Organisasi

Peristiwa penggerebekan di Hotel Wisata dan Sekretariat AJI di Rusun Tanah Abang menjadi pukulan berat secara hukum bagi AJI. Setelah penangkapan tiga aktivis AJI, kepolisian menggelar konferensi pers pada 17 Maret 1995. Di saat bersamaan, Ketua PWI Jaya, Tarman Azzam, mengumumkan pencabutan keanggotaan 13 wartawan PWI Jaya yang terlibat dalam penandatanganan Deklarasi Sirnagalih di Bogor pada 7 Agustus 1994.⁵¹ Dalam pernyataannya, Tarman Azzam menegaskan bahwa Deklarasi Sirnagalih dianggap menolak konsep wadah tunggal profesi wartawan, sementara PWI, berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan satu-satunya organisasi resmi wartawan Indonesia. Keputusan ini diambil setelah memberikan kesempatan enam bulan kepada para wartawan untuk menarik kembali dukungan mereka terhadap deklarasi tersebut. Namun, karena tidak ada perubahan sikap, PWI Jawa memutuskan untuk mencabut keanggotaan mereka dan meminta PWI Pusat mengukuhkan keputusan tersebut.

Tiga belas wartawan yang dipecat meliputi tujuh mantan wartawan *Tempo* yaitu Happy Sulistiyadi, Adrian T. Gesuri, Diah Purnomowati, Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Budiman S. Hartoyo, Toriq Hadad, Yopie Hidayat, dan Moebanoe Moera. Serta empat wartawan dari media lain seperti P. Hasudungan Sirait dari *Bisnis Indonesia*, Eros Djarot Eks-Detik, Satrio Arismunandar dari *Kompas*, dan Yosep Adi Prasetya dari Majalah *Jakarta-Jakarta*.⁵² Menteri Harmoko mendukung langkah PWI dengan mengancam sanksi terhadap media yang mempekerjakan wartawan non PWI.⁵³ Pada 18 Maret 1995, Harmoko kembali menegaskan bahwa media massa yang mempekerjakan wartawan, yang dicabut keanggotaan

⁵¹ "13 Wartawan Dinyatakan Gugur Keanggotaannya Dari PWI Jaya". *Suara Pembaruan*. 18 Maret 1995, hlm 15.

⁵² "13 Wartawan Dinyatakan Gugur Keanggotaannya Dari PWI Jaya". *Suara Pembaruan*. 18 Maret 1995, hlm 15.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 15.

PWI-nya, dapat dikenai sanksi oleh Departemen Penerangan. Pernyataan tersebut disampaikan Harmoko sebagaimana dikutip *Suara Pembaruan* sebagai berikut:

“Penerbitan pers yang mempekerjakan wartawan yang status keanggotaannya dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) digugurkan, bisa terkena sanksi. Begitu pula penerbitan pers yang tidak disertai Surat Izin Penerbitan pers (SIUPP) dan Surat Tanda Terdaftar (STT), bisa kena sanksi.”⁵⁴

Pernyataan ini semakin mempersempit ruang gerak AJI. Meskipun demikian, AJI tetap menunjukkan eksistensinya dengan menggelar konferensi pers di LBH Jakarta pada 20 Maret 1995. Dalam kesempatan itu, Sekjen AJI, Santoso, menyatakan bahwa AJI menolak sistem wadah tunggal dan mengkritik PWI sebagai alat kekuasaan yang otoriter.

Pasca tekanan yang bertubi-tubi, AJI memutuskan mengadakan kongres untuk merekonstruksi organisasi. Kongres digelar secara rahasia di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, pada 7-8 Oktober 1995.⁵⁵ Hasil kongres menetapkan Santoso sebagai Ketua Presidium dan Satrio Arismunandar sebagai Sekretaris Jenderal AJI periode 1995-1997. Selain itu, AD/ART dipertegas dengan komitmen memperjuangkan kebebasan pers, hak publik atas informasi, dan hak berserikat. Keanggotaan AJI dibuka untuk jurnalis Indonesia yang sepaham dengan visi organisasi, dengan pendanaan berasal dari iuran anggota dan sumbangan simpatisan. Program kerja mencakup seminar, pelatihan jurnalistik, dan penerbitan buku, seta kerja sama dengan organisasi profesi dalam dan luar negeri yang sejalan dengan prinsip AJI.



Gambar 4.13 : Kongres Pertama AJI Tahun 1995 di Yogyakarta

Sumber: Abdul Manan (2019:70)

Meskipun kongres berhasil memulihkan struktur organisasi, AJI tetap menghadapi tekanan. Majalah Independen, yang dikelola secara terpisah oleh Masyarakat Indonesia Pecinta Pers Alternatif (MIPPA), dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung dengan tuduhan menyebarkan permusuhan terhadap pemerintah. Pasca Peristiwa 27 Juli 1996, aktivis AJI kembali menjadi target operasi intelijen. Satrio Arismunandar terpaksa menghilang dari peredaran sebagai strategi supaya tidak diketahui oleh aparat. Sementara itu, kegiatan AJI kembali dijalankan

⁵⁴ "Mempekerjakan Wartawan yang Keanggotaan PWI-nya Digugurkan Bisa Kena Sanksi". *Suara Pembaruan*. 19 Maret 1995, hlm 4.

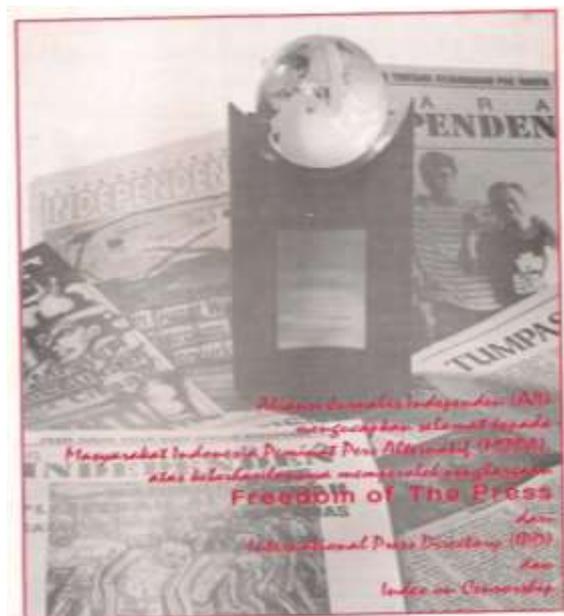
⁵⁵ Abdul Manan. (2014). *Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, hlm. 122.

secara bawah tanah oleh Lukas Luwarso dan aktivis AJI lainnya. Kongres Pertama AJI menjadi tonggak penting dalam mempertahankan eksistensi organisasi di tengah represi Orde Baru. Meskipun gerakannya dibatasi, AJI berhasil memformulasikan strategi perjuangan yang lebih terstruktur, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak.

AJI dan Gerakan Kebebasan Pers Internasional

AJI sejak berdirinya telah menjadikan kemerdekaan pers sebagai tujuan utama perjuangan. Lahir sebagai respons terhadap sistem pers yang represif di era Orde Baru, AJIO tidak hanya aktif di tingkat nasional tetapi juga membangun jaringan dan mendapatkan pengakuan internasional. Salah satu bentuk perjuangan AJI adalah melalui penerbitan majalah *Independen* yang berani mengangkat isu-isu sensitif. Keberanian ini mengantarkan majalah tersebut meraih *Press Freedom Award 1995* dari *International Press Directory (IPD)* pada 6 Desember 1995. Penghargaan ini diberikan karena *Independen* dinilai mampu mempertahankan nilai-nilai kebebasan pers di tengah tekanan politik. Ursula Owen dari *Index of Censorship* menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bentuk dukungan komunitas internasional bagi perjuangan kebebasan berekspresi di Indonesia. Saat Ursula Owen, wakil dari *Index of Censorship*, mengumumkan hal itu ia mengatakan:

“Bagi kita di negeri yang biasa menerbitkan pers dengan bebas, sangat mudah untuk melupakan bahwa ada orang-orang yang masih berhadapan dengan masalah bahwa penerbitan pers sering kali berisiko di penjara atau kematian... Penghargaan ini diberikan oleh komunitas penerbit internasional sebagai dukungan untuk perjuangan kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi orang lain yang menghadapi hal yang sama”.⁵⁶



Gambar 5.8: Piala penghargaan dari IPD

Sumber: *Suara Independen*. No.06/I/Desember 1995, hlm. 36.

⁵⁶ “Pengakuan Buat Pers Alternatif”. *Suara Independen*. No.06/I/Desember 1995, hlm. 34.

Sebelumnya, pada 5 Desember 1995, aktivis AJI Ahmad Taufik juga menerima CPJ International Press Freedom Award di New York dari Committee to Protect Journalists (CPJ). Taufik terpilih mewakili Asia bersama jurnalis dari Rusia, Guatemala, Sambia, dan Irlandia.⁵⁷ Pengakuan internasional terhadap AJI semakin kuat ketika organisasi ini diundang untuk berbicara dalam peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia di UNESCO, Paris, pada 3 Mei 1996. Dalam forum tersebut, AJI menyoroti represi pemerintah Indonesia, termasuk pemberlakuan SIUPP yang digunakan untuk membungkam media kritis. Diskusi juga menyerukan pembebasan tanpa syarat bagi aktivis pers yang dipenjarakan.⁵⁸

Pada 1997, AJI kembali mendapat pengakuan internasional melalui The Free Media Pioneer Award dari International Press Institute (IPI), Global Network of Editors, dan The Freedom Forum. Penghargaan ini diserahkan kepada Satrio Arismunandar (Sekjen AJI 1995-1997) dalam IPI World Congress di Granada, Spanyol. Satrio menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk AJI, tetapi juga untuk seluruh jurnalis Indonesia yang berjuang ri tengah represi.⁵⁹ Perjuangan AJI semakin meluas ke forum global ketika Ging Ginanjar berbicara di Komisi HAM PBB di Jenewa pada April 1997. Ia mengancam kontrol ketat pemerintah Orde Baru terhadap pers, sementara Robertus Robert (YLBHI) menyoroti pelanggaran HAM sistematis di Indonesia. Sidang tersebut menjadi momentum dimana Indonesia dikritik oleh komunitas internasional, termasuk oleh Uni Eropa dan ICFTU, yang mengecam pembungkaman demokrasi. Hal di atas menunjukkan bahwa AJI tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap represi pers nasional, tetapi juga bagian dari gerakan global untuk kebebasan pers.⁶⁰ Pengakuan internasional yang didapatkan AJI memperkuat posisinya sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan demokratisasi pers, meskipun tantangan dan risiko yang dihadapi tetap besar hingga akhir Orde Baru.

AJI dan Lahirnya UU Pers No.40 Tahun 1999

Krisis multidimensional yang melanda Indonesia sejak 1997, meliputi krisis ekonomi, politik, dan sosial, menciptakan tekanan berat bagi industri pers. Nilai tukar rupiah yang anjlok menyebabkan harga kertas koran melambung tinggi, memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan gulung tikarnya sejumlah penerbitan. Di tengah situasi tersebut, kebijakan represif Orde Baru terhadap pers semakin memperparah kondisi. Puncaknya terjadi saat tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998, yang memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, membuka babak baru bagi demokratisasi pers di Indonesia.⁶¹

Pasca lengsernya Soeharto, AJI bersama aktivis pers segera mendorong reformasi sistem pers. Tuntutan utama mereka adalah penghapusan SIUPP dan monopoli PWI sebagai

⁵⁷ Ibid., hlm. 34.

⁵⁸ "Hari Kemerdekaan Pers di Unesco". *Suara Independen*. No. 10/ 1 Mei 1996, hlm. 14.

⁵⁹ "AJI Peroleh Penghargaan Internasional "The Free Media Pioneer"". *Suara Independen*. No.6/III/April 1997, hlm. 29.

⁶⁰ "Kesaksian AJI di Sidang PBB". *Suara Independen*. No.7/III/1997, hlm. 10.

⁶¹ Ignatius Haryanto. *Laporan Tahunan 1997/1998: Pers Diterpa Krisis*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen dan PSP, hlm. 1.

satu-satunya organisasi wartawan. Menteri Penerangan baru, Yunus Yosfiah, merespons dengan mencabut Perenpen No. 1/1984 tentang SIUPP pada 5 Juni 1998, menyederhanakan prosedur perizinan sekaligus menghapus kewenangan pemerintah untuk membredel media secara sepihak. Kebijakan progresif ini dilanjutkan dengan pencabutan status monopoli PWI, yang membuka jalan bagi eksistensi organisasi jurnalis independen seperti AJI. Yunus Yosfiah menegaskan:

“Insya Allah saya tidak akan mengecewakan pers dan berjanji tak akan membatalkan SIUPP. Saya akan membantu memperlancar tugas-tugas pers yaitu media cetak maupun elektronik,” jelas Menpen Baru, Yunus Yosfiah.”⁶²

Peran AJI dalam reformasi pers semakin nyata ketika terlibat aktif dalam penyusunan RUU Pers baru. Melalui serangkaian diskusi, termasuk “Reformasi Media Massa” pada 2 Juni 1998, AJI menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijamin UU baru yaitu penghapusan SIUPP dan mekanisme sensor, kebebasan organisasi bagi wartawan, serta perlindungan hukum dari intimidasi. Meski awalnya mengusulkan agar kebebasan pers diatur melalui amandemen UUD 1945, AJI akhirnya mendukung RUU Pers setelah menyadari kompleksitas proses amandemen. Pada 13 September 1999, DPR mengesahkan UU Pers No. 40/1999 yang menjadi landasan demokratisasi pers di Indonesia. UU ini menegaskan kebebasan pers sebagai hak asasi manusia, menghapus SIUPP dan larangan penyensoran, serta mengakui pluralisme organisasi wartawan.

Keberhasilan reformasi pers tidak lepas dari peran Yunus Yosfiah, yang mencabut SIUPP dan membubarkan Departemen penerangan pada 1999. AJI terus melanjutkan perjuangan dengan membentuk Komite Perlindungan Wartawan dan menginisiasi Udin Award untuk mengenang jurnalis yang menjadi korban kekerasan. UU Pers No. 40/1999 menjadi tonggak sejarah yang mengakhiri era otoritarianisme pers, meski tantangan dalam menjadi independensi dan profesionalisme media tetap harus diwaspadai. Seperti dikatakan Lukas Luwarso bahwa kebebasan pers bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru untuk membangun sistem pers yang benar-benar demokratis.



Gambar 5.12: Ilustrasi Menpen Mencabut Permen 01/1984

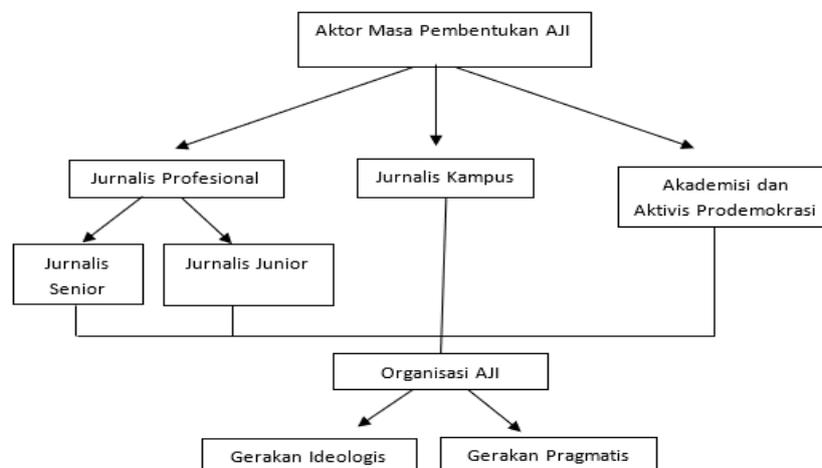
Sumber: *Suara Pembaharuan* 7 Juni 1998, hlm. 2.

⁶² “Menpen Takkan Kecewakan Pers”. *Suara Pembaruan*. 27 Mei 1998, hlm. 8.

Agensi Pembentukan AJI

Munculnya AJI tidak dapat dilepaskan dari peran para wartawan sebagai aktor perubahan dalam struktur pers di Indonesia. Dilihat dari teori aksi kolektif Charles Tilly (1978), AJI merupakan bentuk mobilisasi kolektif akibat ketidakpuasan para wartawan terhadap PWI yang gagal memperjuangkan kepentingan wartawan. Namun sebaliknya, PWI berubah sebagai alat kontrol negara terhadap pers. Dalam teori strukturasi, PWI merepresentasikan struktur yang mengekang (*constraining*) sementara AJI muncul sebagai *agensis* yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengubah struktur (*enabling*). Para wartawan pendiri AJI menunjukkan karakteristik *agent of change* yang tidak hanya memiliki kesadaran kritis terhadap dominasi struktural, tetapi juga kemampuan untuk mengorganisir sumber daya (*resource mobilization*). Dalam menjalankan aksi kolektifnya, AJI mendapat dukungan luas dari aktivis kampus, akademisi, masyarakat pro demokrasi dan jaringan wartawan internasional. Selain itu, AJI menerbitkan majalah *Independen* sebagai alat untuk membentuk opini masyarakat, yang akhirnya menjadi kekuatan kolektif untuk aksi kolektif yang bertujuan mengubah struktur pers Orde Baru.

Lahirnya AJI dirancang oleh tiga kelompok aktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga elemen aktor utama yaitu praktisi media profesional, jurnalis kampus, dan akademisi serta aktivis prodemokrasi. Kolaborasi ketiga elemen ini menciptakan dinamika gerakan AJI. Aktor-aktor penggerak pada masa pembentukan AJI dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 3.11: Skema

Sumber: Pemetaan pemikiran penulis (Raisye)

Elemen pertama yaitu praktisi media profesional, yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori wartawan. Kelompok pertama terdiri dari wartawan senior, yaitu mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia jurnalistik dan secara langsung merasakan dampak represif regulasi pemerintah Orde Baru. Mereka tidak hanya menghadapi berbagai bentuk tekanan, seperti teror, ancaman, dan intimidasi, tetapi juga kehilangan mata pencaharian ketika media tempat mereka bekerja dibredel pemerintah Orde Baru di era tahun 70-an hingga 80-an. Dalam gerakan AJI, wartawan senior ini berperan sebagai konsultan dan memberikan *link* jaringan internasional. Beberapa nama yang termasuk dalam kategori ini antara lain Jus Soema

Di Pradja, Goenawan Mohamad dan Eros Djarot. Mereka adalah wartawan-wartawan yang kritis dan pemberani namun pada saat media tempat mereka bekerja dibredel, struktur kekuasaan Orde Baru masih sangat kuat sehingga pergolakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah terhadap pers hanya diterima dengan kekesalan yang kekecewaan yang terpendam.⁶³



Gambar 3.1: Aksi Protes Wartawan yang didukung Wartawan Senior.

Sumber: Koleksi pribadi Dhia Prekasha Yoedha.

Kelompok kedua yang termasuk dalam klasifikasi wartawan profesional yaitu kelompok jurnalis junior. Kelompok ini terdiri dari jurnalis-jurnalis yang relatif masih muda dan memiliki idealisme yang kuat terhadap terwujudnya demokratisasi pers. Rata-rata dari mereka memiliki latar belakang sebagai aktivis kampus baik intra maupun ekstra kampus.⁶⁴ Latar belakang sebagai aktivis membuat para pendiri AJI memiliki jaringan yang luas dan kemampuan untuk mengorganisir massa, menggulirkan isu-isu dan kebijakan politik kepada sesama aktivis, maupun para simpatisan pergerakan.⁶⁵ Meskipun mereka memiliki latar belakang organisasi kampus yang berbeda secara ideologis, namun mereka mampu bersatu dan mendirikan AJI sebagai sarana untuk memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia.⁶⁶ Aktor yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Ahmad Taufik, Andreas Harsono, Yosep Stanley Adi Prasetyo, dan Santoso.

Elemen kedua yang menjadi aktor pada masa pembentukan AJI yaitu jurnalis kampus. Media kampus pada era Orde Baru (1966-1998) berperan sebagai salah satu wadah penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan pemikiran kritis, meskipun harus beroperasi di bawah tekanan pemerintahan otoriter. Awalnya media-media kampus merupakan corong pergerakan

⁶³ Wawancara dengan Jus Soema Di Pradja di rumah kediaman Jus Soema Di Pradja pada 19 Oktober 2024.

⁶⁴ Organisasi intra kampus adalah lembaga yang berada di lingkungan dan diakui perguruan tinggi. Untuk pendirinya, organisasi intra kampus memiliki Surat Keputusan (SK) yang biasanya ditandatangani oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan. Contohnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Sedangkan organisasi ekstra kampus biasanya terkonsentrasi pada aktivitas sosial atau masyarakat di luar organisasi perguruan tinggi. Organisasi ini dilandasi oleh beberapa persamaan misal agama, keahlian, atau bahkan asal daerah. Contoh Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan lain-lain. <https://www.tempo.co/politik/perbedaan-serta-daftar-organisasi-mahasiswa-intra-dan-ekstra-kampus-159089>

⁶⁵ Wawancara Dhia Prekasha Yoedha pada 17 Oktober 2024 di Kafe Kaizen Heritage, Matraman, Jakarta Timur.

⁶⁶ Wawancara Dhia Prekasha Yoedha pada 17 Oktober 2024 di Kafe Kaizen Heritage, Matraman, Jakarta Timur.

mahasiswa, namun kemudian media-media ini menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Isu-isu yang diangkat sering kali bersifat kritis, seperti demokrasi, HAK, korupsi dan kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan rakyat. Beberapa media kampus yang cukup berpengaruh saat itu antara lain *Harian Kampus* (HK) UI yang sempat dibredel pada 1978 karena dianggap terlalu vokal, *Balairung* UGM, *Gamma* ITB, *Suara USU*, *Lentera* UNAIR, dan *FOWI* Unpad. Tokoh-tokoh yang menggerakkan jurnalisme kampus pada masa Orde Baru banyak yang kemudian menjadi aktivis atau jurnalis profesional. Aktor yang termasuk dalam kategori ini yaitu Eko Maryadi.



Gambar 3.6: Rapat Rutin Pengurus AJI di Rumah Susun Tanah Abang (Reboan). Aktivis AJI yang ada di foto tersebut diantaranya Dhia Prakesha Yoedha (baju denim), Ahmad Taufik (Baju kotak-kotak, dan Eko Maryadi (Baju Hitam).

Sumber: Koleksi Dhia Prakesha Yoedha

Elemen ketiga yang menjadi aktor pada masa pembentukan AJI yaitu akademisi dan aktivis prodemokrasi. Tokoh yang menonjol dari elemen ketiga ini salah satunya yaitu Arief Budiman. Ia merupakan seorang intelektual dan aktivis yang selalu konsisten memperjuangkan kebebasan berpikir dan kebebasan pers. Sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1960-an, ia aktif menggalang berbagai aksi unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah. Beberapa gerakan yang terkenal diantaranya adalah Gerakan Komite Anti Korupsi (KAK) dan Golongan Putih (Golput). Setelah menyelesaikan S3 di Harvard tahun 1981, Arief Budiman bekerja sebagai dosen Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Saat terjadi Pembredelan 1994, Arief Budiman termasuk vokal dalam melancarkan kritik terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Tulisan-tulisan Arief Budiman yang membahas tentang buruknya sistem pers era Orde Baru banyak diterbitkan di berbagai media massa dan jurnal ilmiah.⁶⁷

Sebagai seorang pemikir, Arief Budiman meyakini bahwa kebebasan pers merupakan prasyarat penting bagi tegaknya demokrasi. Salah satu sikap Arief Budiman dalam memperjuangkan pers yang independen yaitu pada saat Arief Budiman menginisiasi Gerakan Boikot *Gatra*.⁶⁸ Menurut Arief Budiman, *Gatra* merupakan produk yang kelahirannya direkayasa oleh kekuasaan. Lebih lanjut Arief Budiman menegaskan bahwa *Gatra* merupakan

⁶⁷ Ayu Utami. (1994). *Bredel 1994: Kumpulan Tulisan Tentang Pembredelan Tempo, Detik, Editor*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, hlm 23.

⁶⁸ Lihat lampiran 6.

salah satu bukti terpenting dari adanya upaya mengendalikan pers melalui modal.⁶⁹ Dalam rubrik Wawancara majalah *Independen*, Arief Budiman memaparkan alasannya menggalang gerakan pemboikotan *Gatra* sebagai berikut:

“Bagi saya, *Gatra* adalah simbol kesewenang-wenangan pemerintah. Dia berdiri di atas bingkai *Tempo*, yang dibunuh dengan sewenang-wenang. *Gatra*, merupakan suatu penerbitan yang hanya bisa tumbuh hanya karena adanya penerbitan lain yang dibunuh. Jadi hidupnya tergantung pada bangkai orang lain. Dan juga, karena itu, ada pemalsuan. *Gatra* langsung meniru *Tempo* dan mendapat proteksi dari pemerintah sambil mengambil alih modalnya, Tindakan itu harus dilawan.”⁷⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa munculnya AJI merupakan interaksi dialektis antara struktur yang membatasi dan agensi yang membebaskan inilah yang menjadi inti pendekatan strukturalis dalam menganalisis transformasi sosial, hal ini tercermin dalam kelahiran AJI sebagai respons terhadap hegemoni PWI di era Orde Baru. Sebagai aksi kolektif, AJI menunjukkan bahwa kelahiran AJI ditopang oleh beberapa aspek. Pertama, adanya mobilisasi sumber daya dari tiga elemen aktor utama (Wartawan profesional, jurnalis kampus, dan akademisi serta aktivis pro demokrasi. Kedua, adanya pembangunan jaringan solidaritas wartawan nasional dan internasional. Ketiga, adanya kemampuan memanfaatkan kesempatan politik di akhir era Orde Baru.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap peran strategis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai kekuatan transformatif dalam memperjuangkan kebebasan pers dan membangun jurnalisme independen di Indonesia pada periode 1994-1999. Kelahiran AJI dapat dipahami dalam konteks struktural Orde Baru yang melakukan kontrol ketat dan sistematis terhadap ruang publik melalui berbagai mekanisme represif, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, kooptasi terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta sistem perizinan SIUPP yang menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis. Namun, kondisi represif ini justru melahirkan resistensi terorganisir yang tidak hanya berhasil menantang struktur dominan tetapi juga secara aktif membangun sistem alternatif dalam praktik jurnalistik.

Secara analitis, kemunculan AJI merupakan hasil dialektika antara faktor eksternal dan internal. Pada tataran global, transformasi pasca Perang Dingin menciptakan disrupsi geopolitik sekaligus membuka ruang bagi penetrasi nilai-nilai demokrasi melalui kemajuan teknologi. Akselerasi arus informasi dan tekanan normatif internasional menjadi katalisator penting bagi tumbuhnya kesadaran kritis di kalangan jurnalis Indonesia. Sementara itu, pada tataran domestik, munculnya kelas menengah terdidik, terutama dari kalangan jurnalis muda dan mantan aktivis kampus, menciptakan basis sosial yang solid bagi gerakan pembaruan pers. Para pendiri AJI seperti Satrio Arismunandar, Dhia Prakesha Yoedha, Tosca Santoso, Dadang RHS dan Lucas Luarso memanfaatkan jaringan intelektual dan pengalaman aktivisme mereka untuk membangun pers alternatif sebagai alat perlawanan.

⁶⁹ “Gerakan Boikot *Gatra*, Upaya Untuk Bersikap”. *Independen*. No. 8/ 5 Nopember 1994, hlm. 3.

⁷⁰ “Jangan Gunakan Pers yang Tidak Halal”. *Independen*. No. 8/ 5 Nopember 1994, hlm. 4.

Strategi perlawanan AJI berkembang secara dinamis dari aksi simbolik menuju pendekatan yang lebih sistematis dan terlembaga. Gerakan ini mengombinasikan empat pilar utama: (1) pembangunan aliansi strategis dengan elemen masyarakat sipil; (2) pemanfaatan jalur hukum sebagai arena perjuangan ideologis; (3) perluasan jaringan internasional melalui organisasi seperti IFJ; serta (4) pengembangan Pendidikan jurnalistik alternatif dan media alternatif seperti majalah Suara Independen. Pendekatan multidimensional ini tidak hanya mencerminkan kecanggihan taktis tetapi juga menandai pergeseran paradigmatis dalam gerakan sosial Indonesia.

Dampak perjuangan AJI bersifat struktural dan berjangka panjang. Dalam jangka pendek, gerakan ini berhasil mempertahankan eksistensi pers alternatif di tengah represi negara, meningkatkan kesadaran publik tentang kebebasan pers, serta menciptakan tekanan politik terhadap pemerintahan Orde Baru. Sementara dalam jangka panjang, kontribusi AJI terwujud melalui tiga transformasi mendasar yaitu keterlibatan AJI dalam perumusan UU Pers No. 40/1999, normalisasi nilai-nilai jurnalisme independen, dan penciptaan paradigma baru organisasi pers sebagai aktor strategis demokratisasi.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, pengayaan perspektif historiografi pers Indonesia melalui pendekatan *history from below* yang menempatkan aktor non-Elit sebagai subjek sejarah. Kedua, pengembangan model analisis gerakan sosial sebagai kerangka teoritis baru dalam kajian sejarah pers. Ketiga, penegasan pentingnya pendekatan multidisipliner untuk memahami kompleksitas gerakan sosial seperti AJI. Temuan penelitian ini sekaligus mengembangkan teori aksi kolektif Charles Tilly dengan mengidentifikasi varian spesifik gerakan profesional, termasuk peran kapital sosial budaya dalam mengatasi masalah *free-rider* dan bentuk-bentuk perlawanan *hybrid* yang khas gerakan sosial.

Pada tataran praktis, penelitian ini memiliki relevansi kontemporer yang kuat. Bagi praktisi pers, pengalaman AJI menawarkan perjalanan berharga tentang ketahanan redaksional menghadapi tekanan negara. Bagi aktivis demokrasi, gerakan ini memberikan *blueprint* tentang efektivitas strategi yang mengombinasikan resistensi langsung dengan pembangunan kapasitas jangka panjang. Prinsip-prinsip kunci seperti konektivitas internal, jejaring aliansi lintas sektor, dan adaptasi teknologi tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru di era digital.

Penelitian ini membuka beberapa agenda penting untuk studi lanjutan, termasuk kajian transformasi gerakan pers di era digital, analisis komparatif dengan pengalaman negara transisional lain, eksplorasi jaringan intelektual AJI melalui arsip internasional, serta penelitian tentang transmisi nilai-nilai AJI kepada generasi jurnalis pasca Reformasi. Pada akhirnya, warisan terpenting AJI terletak pada pembuktian bahwa jurnalisme independen bukan hanya mungkin diwujudkan dalam sistem yang represif, tetapi juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial yang signifikan dalam proses demokratisasi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Arsip

Aliansi Jurnalis Independen. (1995). *Laporan Tahunan*.

Aliansi Jurnalis Independen. (1996). *Laporan Tahunan*.

Aliansi Jurnalis Independen. (1997/1998). *Laporan Tahunan*.

Arsip Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1984). *Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01/Kep/MENPEN/1984*.

Arsip Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia. (1965). *Keputusan Menteri Penerangan RI No. 29/1965*.

Arsip Sekretariat Negara. (1973). *Kumpulan Presiden Soeharto tahun 1973*. Koleksi ANRI.

Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1975). *Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 47/Kep/Menpen/1975*.

Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1994a). *Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 123/KEP/MENPEN/1994 tentang pembatalan SIUPP Majalah Mingguan TEMPO*.

Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1994b). *Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 124/KEP/MENPEN/1994 tentang pembatalan SIUPP Majalah Mingguan EDITOR*.

Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1994c). *Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 125/KEP/MENPEN/1994 tentang pembatalan SIUPP Tabloid Detik*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 307/1962 tentang pembentukan Lembaga Kantor Berita Antara.

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6/1963 tentang ketentuan-ketentuan pembinaan pers.

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto tahun 1976.

Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 47 Tahun 1975 Tentang Pengukuhan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sebagai Organisasi Kewartawanan Tunggal.

Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 133/SK/MENPEN/1998 Tentang Pencabutan SK Menpen No. 47 Tahun 1975.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. (1982). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47032/uu-no-21-tahun-1982>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Pers.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pers. (n.d.). *Laporan YLBH Pers*. <https://lbhpers.org/laporan-2/>.

Surat Kabar dan Majalah

Bisnis Indonesia, 22 Juni 1994.

Detik, 14-20 Juli 1993.

Detik, 18-24 Agustus 1993.

Detik, 22-28 Desember 1993.

Detik, 16-22 Februari 1994.

Detik, 17 Maret 1994.

Detik, 23-29 Maret 1994.

Detik, 22-28 Juni 1994.

Editor, 29 Agustus 1987.

Editor, 17 Maret 1994.

FOWIMEDIA, 17 Agustus 1994.

Independen, 10 Januari 1994.

Independen, 10 September 1994.

Independen, 5 Oktober 1994.

Independen, 5 Nopember 1994.

Independen, 6 Maret 1995.

Independen, Desember 1995.

Independen, 10 Januari 1996.

Jakarta Jakarta, Agustus 1987.

Kompas, 16 Oktober 1970.
Kompas, 26 Oktober 1970.
Kompas, 26 Oktober 1970.
Kompas, 26 Februari 1988.
Kompas, 20 Maret 1995.
Kompas, 28 Juni 2000.
Kompas, 27 November 2010.
Merdeka, 11 Februari 1946.
Merdeka, 23 Juni 1994.
Merdeka, 30 Juni 1994.
Pers Indonesia, April 1978.
Prisma, 10 Oktober 1977.
Prisma, 11 Desember 1978.
Prisma, 1978.
Prisma, 1985.
Prisma, 1990.
Republika, 8 Maret 1994.
Sinar Harapan, 2 November 1970.
Suara Independen, Juni 1995.
Suara Independen, Agustus 1995.
Suara Independen, Desember 1995.
Suara Independen, Januari-Februari 1996.
Suara Independen, Mei 1996.
Suara Independen, Juni 1996.
Suara Independen, Juli 1996.
Suara Independen, April 1997.
Suara Independen, Mei 1997.
Suara Independen, September 1998.
Suara Pembaruan, 18 Maret 1994.

Suara Pembaruan, 22 Maret 1994.
Suara Pembaruan, 4 Juni 1994.
Suara Pembaruan, 22 Juni 1994.
Suara Pembaruan, 23 Juni 1994.
Suara Pembaruan, 24 Juni 1994.
Suara Pembaruan, 4 Juli 1994.
Suara Pembaruan, 4 Juni 1995.
Suara Pembaruan, 18 Juni 1995.
Suara Pembaruan, 14 Juli 1995.
Suara Pembaruan, 18 Maret 1995.
Suara Pembaruan, 19 Maret 1995.
Suara Pembaruan, 11 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 19 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 23 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 24 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 25 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 26 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 29 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 30 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 2 September 1995.
Suara Pembaruan, 12 September 1995.
Suara Pembaruan, 27 September 1995.
Suara Pembaruan, 10 Oktober 1996.
Suara Pembaruan, 5 Agustus 1997.
Suara Pembaruan, 2 Januari 1998.
Suara Pembaruan, 6 Januari 1998.
Suara Pembaruan, 11 Januari 1998.
Suara Pembaruan, 16 Januari 1998.
Suara Pembaruan, 19 Januari 1998.

Suara Pembaruan, 20 Januari 1998.
Suara Pembaruan, 22 Januari 1998.
Suara Pembaruan, 9 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 13 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 15 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 16 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 17 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 20 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 24 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 26 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 27 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 28 Februari 1998.
Suara Pembaruan, 5 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 6 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 10 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 12 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 18 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 21 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 22 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 26 Maret 1998.
Suara Pembaruan, 11 April 1998.
Suara Pembaruan, 16 April 1998.
Suara Pembaruan, 17 April 1998.
Suara Pembaruan, 22 April 1998.
Suara Pembaruan, 24 April 1998.
Suara Pembaruan, 29 April 1998.
Suara Pembaruan, 2 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 5 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 8 Mei 1998.

Suara Pembaruan, 13 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 14 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 19 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 20 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 21 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 25 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 27 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 28 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 29 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 30 Mei 1998.
Suara Pembaruan, 4 Juni 1998.
Suara Pembaruan, 6 Juni 1998.
Suara Pembaruan, 8 Juni 1998.
Suara Pembaruan, 15 Juni 1998.
Suara Pembaruan, 19 Juni 1998.
Suara Pembaruan, 22 Juni 1998.
Suara Pembaruan, 23 Juni 1998.
Suara Pembaruan, 1 Juli 1998.
Suara Pembaruan, 13 Juli 1998.
Suara Pembaruan, 14 Juli 1998.
Suara Pembaruan, 18 Juli 1998.
Suara Pembaruan, 25 Juli 1998.
Suara Pembaruan, 28 Juli 1998.
Suara Pembaruan, 30 Juli 1998.
Suara Pembaruan, 2 Agustus 1998.
Suara Pembaruan, 4 Agustus 1998.
Suara Pembaruan, 6 Agustus 1998.
Suara Pembaruan, 8 Agustus 1998.
Suara Pembaruan, 18 Agustus 1998.

Suara Pembaruan, 27 Agustus 1998.
Suara Pembaruan, 31 Agustus 1998.
Suara Pembaruan, 6 September 1998.
Suara Pembaruan, 11 September 1998.
Suara Pembaruan, 14 September 1998.
Suara Pembaruan, 25 September 1998.
Suara Pembaruan, 10 Oktober 1998.
Suara Pembaruan, 27 Oktober 1998.
Suara Pembaruan, 6 November 1998.
Suara Pembaruan, 18 November 1998.
Suara Pembaruan, 28 November 1998.
Suara Pembaruan, 1 Desember 1998.
Suara Pembaruan, 13 September 1999.
Tempo, 7 September 1974.
Tempo, 5 Maret 1977.
Tempo, Februari 1979.
Tempo, 9 Mei 1992.
Tempo, 23 Mei 1992.
Tempo, 30 Mei 1992.
Tempo, 7 Mei 1994.
Tempo, 21 Mei 1994.
Time, Juni 1994.

Buku

Abar, Akhmad Zain. (1995). *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Adam, Ahmat. (1995). *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Keindonesiaan, 1885-1913*. Jakarta: Hasta Mitra.

Adji, Oemar Seno. (1973). *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Agassi, Judith B. (1969). *Mass Media in Indonesia*. Center for International Studies. Massachusetts: Cambridge.

- Alfian. (1991). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (1993). *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ali, F., & Novianto, K. (1997). *Politik Komunikasi Harmoko: Dari Rakyat ke Panggung Politik*. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Amri, Rahmon. (2017). *Merawat Kebebasan Pers Dengan Objektivitas*. Jakarta: Dean Pers,
- Anwar, H. R. (1983). *Menulis dalam Air: Sebuah Otobiografi*. Sinar Harapan.
- _____. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (1992). *Indonesia 1966-1983: Dari Koresponden Kami di Jakarta*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- _____. (1996). *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Pustaka dan Gatra.
- Anderson, Benedict. (2008). *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIST.
- Armada, Wina S.A. (1993). *Menggugat Kebebasan Pers*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Assegaff, Dja'far Husin. (1983). *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.
- Atmadi, T. (1985). *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- _____. (1985). *Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT. Panjta Sempati.
- _____. (1987). "Pers Indonesia Sebagai Pers Pancasila," *Jurnal Komunikasi*, Bil 3 1987, Jabatan Komunikasi University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan.
- Atmakusumah. (1981). *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- _____. (2002). *Hakikat Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Lembaga Pers Dr. Soetomo.
- _____. (2009). *Tuntutan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta: Spasi & VHR Book.

- _____. (2018). *Pers Ideal untuk Masa Demokrasi*. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).
- _____. (2023). *Membangun Pers Independen*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Atton, Chris. (2022). *Alternative Media*. London: Sage Publications.
- Bailey, O., Cammaerts, B., & Carpentier, N. (2007). *Understanding alternative media*. McGraw-Hill Education (UK).
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan* Jakarta: LP3ES.
- Berger, P. L., & Luckman, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Anchor Books.
- Blog, P. W. (1957). *Kebebasan pers dalam Majalah Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: P.T. Pembangunan.
- Booth, Anne & McCawley, Peter. (1982). *Ekonomi Orde Baru*. Terjemahan Boediono. Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES.
- Budiman, Arif. (1990). “*Negara: Kesadaran, Kemauan, dan Keterbatasan Strukturalnya*”, dalam *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (1997). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bujono, Bambang & Hasibuan, Imran. (1994). *Wartawan Independen Sebuah Pertanggungjawaban AJI*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Couldry, N. (2012). *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Polity Press.
- Crouch, Harold. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Darwis, Yuliandri. (2013). *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- De Fleur, Melvin & Ball-Rokeach, Sandra. (1989). *Theories of Mass Communication*. Fifth Edition. New York and London: Logman.
- Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UI. (1981). *Kamus Istilah Jurnalistik*. Jakarta: Proyek Pengembangan Bahasa dan Pengumpulan Istilah Lembaga Bahasa Nasional LIPI.
- Devito, A. (2011). *Komunikasi Antarmanusia*. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.
- Dewi, Irra Chrisyanti. (2015). *Pengantar Psikologi Media*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.

- Dimpoz, Manulu. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eep, S.F. (1999). *Politik Transisi dan Pembalakan Demokrasi*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Efendi, Akhmad. (2019). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana*. Jakarta: LkiS.
- Fay, Brian., et all. (1998). *History and Theory: Contemporary Readings*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Frederick, W. H., & Soeroto, S. (1984). *Pemahaman Sejarah Indonesia: sebelum dan sesudah revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Frederick, W. H. (1989). *Visions and heat: The making of the Indonesian revolution*. Ohio University Press.
- Gani, M. (1978). *Surat Kabar Indonesia pada Tiga Zaman*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Giddens., Anthony. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Los Angeles: University of California Press.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Grouch, Harold. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communication Action*. Vol.I: Reason and the Rationalization of Society. Beacon. [German, 1981, vol.1], Boston.
- _____. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Thomas Burger. Cambridge: MIT Press, 85(85-92), 180.
- Hanazaki, Yasuo. (1998). *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Harahap, Krisna. (2003). *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Bandung: Graffiti.
- _____. (2000). *Kebebasan Pers di Indonesia*. Bandung: Graffiti.
- Harsono, Andreas. (1995). *Wartawan Independen Sebuah Pertanggungjawaban AJI*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

- Haryanto, I., Laksmi, G. W., & Untung, B. (2004). *Kembalinya Otoritarianisme: Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen 2004*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi; Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Herman, E.S., Chomsky, N., (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media*. Pantheon Books New York.
- Heryanto, A. (1996). *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*. Routledge.
- Hidayat, D. N. (Ed.). (2000). *Pers dalam "Revolusi Mei": runtuhnya sebuah hegemoni*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, D. N (2003). *Jurnalisme Alternatif: Perlawanan dari Pinggiran*. Pustaka Pelajar.
- _____. (2000). "Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial", dalam *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, David T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. (2010). *Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) sebagai pemimpin Redaksi dan Pengarang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (Terjemahan) dari judul asli *Journalism and Politics in Indonesia. A critical biography of Mochtar Lubis (1922-2004)*.
- Hutabarat, S. (2010). *Dari Bawah ke Permukaan: Sejarah Perlawanan Wartawan*. Jakarta: Institut Arus Informasi.
- Holt, Clarire (eds). (1972). *Culture and Politics in Indonesia*, London: Cornell University Press.
- Howard, M. E. (2019). *How Journalists and the Public Shape Our Democracy: From Social Media and "fake News" to Reporting Just the Facts*. Georgia Humanities Council.
- Idrus, Ani. (1985). *Sekilas Pengalaman dalam Pers dan Organisasi PWI Sumatra Utara*. Medan: Waspada.
- I.N, Subagio. (1977). *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- _____. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ingleson, J., & Dhofier, Z. (1983). *Jalan ke pengasingan: pergerakan nasionalis Indonesia, tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES.
- Ingleson, J. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Marianne, W. J., & Phillips, L. J. (2017). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Terj, Cetakan keenam).
- Junaedi, Kurniawan. (1995). *Rahasia Dapur Majalah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kabar, S. P. S. (1971). *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: Serikat Penerbit Surat Kabar
- Kahya, Eko. (2004). *Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy.
- Kartodirdjo, Sartono. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Satu Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasali, Renald. (2000). *Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, Positioning*. Jakarta: Gramedia.
- Kellner, Douglas. (2010). *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik: Antara Modern dan Postmodern*. Jogjakarta: jalansutra.
- Klandermans, Bert. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kridalaksana, Harimurti. (1984). *Leksikon Komunikasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusumayudha, Oka. (1987). *Pemasyarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Lee, Hong Oey. (1971). *Indonesian Government and Press During Guided Democracy*. UK: University of Hull Pres
- Leirissa, R. Z. (1985). *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Leirissa, R. Z. (1985). *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lembaga Bantuan Hukum, Aliansi Jurnalis Indonesia. (1966). *Jurnalis Independen Diadili: Pledoi Tiga Terpidana*. Jakarta: LBH Jakarta dan Aliansi Jurnalis Independen

- Lesmana, Tjipta. (1985). *20 Tahun Kompas: Profil Pers Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Erwin-Rika Press.
- Lyod, Christopher. (1986). *Explanation in Social History*. New York: Basil Blackwell Inc.
- _____. (1987). *Teori Sosial dan Praktek Politik*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- _____. (1993). *The Structure of History*. UK: Blackwell Publishers.
- Mallarangeng, Rizal. (2010). *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Manan, Abdul. (2014). *Semangat sirnagalih: 20 tahun aliansi jurnalis independen*. Aliansi Jurnalis Independen.
- _____. (2019). *Sebuah alternatif dari Sirnagalih: 25 tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Aliansi Jurnalis Independen.
- Marihandono, D. (2008). *Titik balik historiografi di Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Maters, Mirjam. (2003). *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pada Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan, 1906-1942*. Jakarta: Hasta Mitra.
- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency*. University of Chicago Press.
- McAdam, D., et al. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.
- McCoy, Mary E. (2019). *Scandal and Democracy: Media Politics in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- McCullagh, C. B. (1998). *The Truth of History*. London and New York: Routledge.
- McLeod, R. (2000). *The Struggle for Regulatory Power in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- McLuhan, M., (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill.
- McQuail, Denis. (1991). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- McQuail, D. (2000). *McQuail's Mass Communication Theory*. Sage Publications.
- McVey, R. (1965). *The rise of Indonesian communism under Sukarno*. Cornell University Press.
- Mirsel, R. (2004). *Teori pergerakan sosial*. Yogyakarta: Insist Press.

- Mohtar Mas' oed. (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Morissan. (2018). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Penamedia Group.
- Mortimer, R. (1974). *Indonesian communism under Sukarno*. Cornell University Press.
- Nababan, Panda. (2009). *Jurnalisme Investigatif*. Jakarta: Q Communication.
- Njoto. (1958). *Pers dan Massa*. Djakarta: N. V. Rakjat.
- Noris, Pippa. (2000). *A Virtuous Circle: Political Communication In Post-Industrial Societies*. New York: Cambridge University Press.
- Oetama, Jakob. (1987). *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Oetama, J. (2001). *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus*. Penerbit Buku Kompas.
- Oman, Sukmana. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Pawito. (2008). *Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta dan Bandung: Jalansutra.
- Peerboom, Robert. (1970). *Surat Kabar: Fungsi, Tugas Serta Pengaruhnya Di Dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poeze, H. A. (2008). *Di negeri penjajah: Orang Indonesia di negeri Belanda 1600–1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dan KITLV-Jakarta.
- Popkin, Samuel L. (1979). *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Los Angeles: University of California Press.
- Pranoto, Suhartono W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Priyono, B. Herry. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia.
- Putra, Fadillah. (2006). *Gerakan Sosial*. Malang: Aerrors Press.
- Rachmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rahzen, Taufik, et.al. (2007). *Tanah air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia*. Jakarta: I:Boekoe.
- Rahzen, T., Dahlan, M. M., & lainnya. (2007). *Seabad pers kebangsaan (1907–2007)*. Yogyakarta: I:Boekoe.

- Raillon, F., & Tamara, N. (1985). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. Jakarta: LP3ES.
- Rajendra, Sing. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rauf, Ismet. (2018). *Perjalanan Panjang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)*. Jakarta: PWI Pusat.
- Retnowati, Endang. (2014). *Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila*. Jakarta: LIPI Pers.
- Ricklefs, M. C. (2004). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rivers, William. L, et al. (2008). *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana. Terjemahan dari judul asli: *Mass Media and Modern Society*.
- Riyanto, Bedjo. (2000). *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915)*. Yogyakarta: Tarawang.
- Robot, Marcelus. (2012). *Bila Ujung Pena Menusuk Jantung Rezim: 9 Hari Surat Kabar Indonesia Menjatuhkan Soeharto*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rodan, Garry. (1996). *Political Oppositions in Industrialising Asia*. London: Routledge.
- Romano, A. (2003). *Politics and The Press in Indonesia*. London: RoutledgeCurzon.
- Sahrasyad, H. (2012). *Jurnalisme Perlawanan*. Yogyakarta: LKis.
- Said, Mohammad, H. (1976). *Sejarah Pers di Sumatra Utara*. Medan: Waspada.
- Said, Tribuana. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Haji Masagung.
- _____ dan Moeljanto, D.S. (1983). *Perlawanan Pers Indonesia (BPS) terhadap Gerakan PKI*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Santoso. (1996). *Bredel di udara: Rekaman Radio ABC, BBC, DW, Nederland, VOA*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sardar, Ziauddin. (2002). *Memaknai Kembali Hubungan Pers dan Pemerintah*. Yogyakarta: Resist Book.
- Schramm, W. (1977). *The Process and Effects of Mass Communication*. Urbana: University of Illinois Press.
- Schroeder, Ralph. (2018). *Social Theory after the Internet: Media, Technology, and Globalization*. London: University College London Press.
- Schwarz, A. (2018). *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*. Routledge.

- Sen, K., & David, T. Hill 2000 *Media, culture and politics in Indonesia*. Victoria, Australia: Oxford University Press.
- Siebert, F.S., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four Theories of the Press*. University of Illinois Press.
- Siregar, Amir Effendi. (1983). *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti*. Jakarta: Karta Unipres.
- _____. (1988). "Pers Indonesia, Berasyik-asyik Sendiri?," *Kompas*, 23 Januari 1988.
- Simanjuntak, Togi. (1998). *Wartawan Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sirait, Hendrik Dikson. (1999). *Melawan Tirani Orde Baru*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- S.K, Ishadi. (2014). *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Smith, Edward, C. (1969). *Pembredelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti pers.
- Snow, D.A., et al. (1986). *Frame Alignment Processes*. American Sociological Review.
- Stanford, Michael. *The Nature of Historical Knowledge*. New York: Basil Blackwell Inc., 1987.
- Steele, J.E. (2005). *Wars Within: The Story of Tempo*. Equinox Publishing.
- Steele, Janet. (2018). *Mediating Islam: Jurnalisme Kosmopolitan di Negara-negara Muslim Asia Tenggara*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Suhandang, Kustandi. (2004). *Pengantar Jurnalistik, seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa.
- Sukardi, L. (2018). *Di balik reformasi 1998: Catatan pribadi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumadiria, As Haris. (2005). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature (Panduan Praktis Jurnalistik Profesional)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005.
- Surjomihardjo, Abdurachman. et.al.(1977). *Sejarah Pers di Indonesia: Sumber dan Hasil Penelitian Awal*. Jakarta: Leknas-LIPI.
- _____. (1980). *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI dan LEKNAS-LIPI.

- Suwirta, Andi. (2015). *Revolusi Indonesia dalam News and Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutrisno, Ery . (1998). *Reformasi Media Massa*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Swantoro, P., & Atmakusumah. (1980). *Pembredelan pers dalam sejarah Indonesia*. Dalam A. Surjomihardjo (Ed.), *Beberapa segi perkembangan sejarah pers di Indonesia*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan RI.
- Syah, Sirikit. (2014). *Membincangkan Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Tamburaka, Apriadi. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tarrow, Sidney. (1994). *Power in Movement. Social Movement, Collective Action and Mass Politics in the Modern State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taufik, I. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Triyinc.
- Thoha, M. R. (2007). *Tersesat Karena Petunjuk Presiden: Agenda Tersembunyi Dibalik Bredel Tempo, Editor, dan Detik, 1994*. Jakarta: Gardu Baca Indonesia.
- Thompson, J.B. (1995). *The Media and Modernity: A Social Theory of The Media*. Oxford: Polity Press.
- Tilly, Charles. (1978). *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley Publishing Company.
- _____. (2003). *The Politics of Collective Action*. Cambridge New York: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles & Tarrow, S. (2015). *Contentious Politics*. New York: Oxford University Press.
- Tim Wartawan Tempo. (1994). *Buku Putih: Pembredelan itu*. Jakarta: Alumni Majalah Tempo.
- Tjondronegoro, S. (1982). INDONESIA IN 1981: Facing the Problems of Succession. *Southeast Asian Affairs*, 135–148. <http://www.jstor.org/stable/27908452>.
- Trappel, J., & Tomaz, T. (2021). Democratic performance of news media: Dimensions and indicators for comparative studies.
- Triharyanto, B. (2009). *Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan*. LKIS.
- Turner, Jonathan. H. (1981). *The Emergence of Sociological Theory*. USA: The Dorsey Press.
- Uhlen, Andreas. (1998). *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.

- Utami, Ayu. (1994). *Bredel 1994: Kumpulan Tulisan Tentang Pembredelan Tempo, Detik, Editor*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Vatikiotis, Michael R. J. (1993). *Indonesian Politics Under Soeharto: Order, development and pressure for change*. London and New York: Routledge.
- Vivian, John. (2008). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyudi, J. B. (1991). *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis kewartawanan Surat Kabar-Majalah, Radio, dan Televisi*. Bandung: IKAPI.
- Wahyuni, Hermin Indah. (2020). *Kebijakan Media Baru di Indonesia: Harapan, Dinamika, dan Capaian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Waltz, Mitzi. (2005). *Alternative and Activist Media*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Wardoyo, D. K. (1997). *Dari celah bui: Tidurlah akal sehat*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- W. F, Wertheim. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Kajian Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. (Terjemahan) dari judul asli: Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change.
- Wibowo, I. (2000). *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Rakyat Cina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, H. (1999). *Jurnalisme Perlawanan: Studi Kasus Detik 1993-1994*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- William, Atkins. (2002). *The Politics of Southeast Asia's New Media*. London: Curzon.
- Yogaswara, A. (2009). *Dalang peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Young, Kimball & Mack Taymond W. (1959). *Sociology and Social Life*. New York: American Book Company.
- Yulianti, Dewi. (2000). *Semaoen, Pers Bumiputera dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang*. Semarang: Bendera.
- Zed, Mestika. (2023). *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.
- Zuhdi, S. (2012). *Indonesia dalam arus sejarah (Jilid 8)*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Karya Ilmiah yang Belum Diterbitkan

- Fuad Gani. (2018). *Kebijakan Informasi Pada Masa Orde Baru: Antara Stabilitas Nasional dan Kebebasan Berekspresi 1965-1998*. Disertasi yang belum diterbitkan.

Satrio Arismunandar & J. Anto. (1996). *Kisah Jurnalis Antikolonialisme di Sumatera Timur: Dari Soetan Koemala Boelan sampai Parada Harahap*. Makalah tidak dipublikasikan.

Artikel, Hasil Penelitian, dan Karya Ilmiah yang Telah Dipublikasikan:

Aspinall, E. (2013). *The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation*. *Journal of Contemporary Asia*.

Atkinson, J. D. (2017). Alternative Media. In *Journey into Social Activism: Qualitative Approaches* (pp. 173–196). Fordham University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1hfr0rk.11>.

Bourdieu, P. (1987). *The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field*. *Hastings Law Journal*.

Crouch, H. (1979). Patrimonialism and military rule in Indonesia. *World Politics*, 31(4), 571–587. <https://doi.org/10.2307/2009992>.

Deane, J.P. (2015). “Media and communication in governance: It’s time for a rethink”. Dalam *A governance Practitioner’s Notebook: Alternative Ideas and Approaches* (eds. A. Whaites et al). OECD-DAC. https://www.semanticscholar.org/paper/Media-and-communication-in-governance%3A-It%27s-time-a-Deane/ea0a48accf203b1106e383429c8c0d8d905863cc?utm_source=direct_link.

Eldridge, P. (1996). Human Rights and Democracy in Indonesia and Malaysia: Emerging Contexts and Discourse. *Contemporary Southeast Asia*, 18(3), 298–319. <http://www.jstor.org/stable/25798345>.

Haryanto, Ignatius. “Industri Media Membesar Bagus untuk Bisnis, Tapi untuk Demokrasi?”, *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol. 3 No. 1, 2008, hlm. 60-61.

Heng, R. (2002). *Media Fortunes, Changing Times: ASEAN States in Transition*. Singapore: ISEAS Publishing. <https://doi.org/10.1355/9789812306081>.

Heryanto, A. (1997). INDONESIA: Towards the Final Countdown? *Southeast Asian Affairs*, 107–126. <http://www.jstor.org/stable/27912174>.

Heryanto, A., & Adi, S. Y. (2001). The Industrialization of the Media in Democratizing Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 23(2), 327–355. <http://www.jstor.org/stable/25798549>.

Hill, D. T. (1992). The Press in a Squeeze: Operating Hazards in the Indonesian Print Media. *Southeast Asian Journal of Social Science*, 20(2), 1–28. <http://www.jstor.org/stable/24491696>.

Hill, D. T., & Sen, K. (1997). Wiring the Warung to Global Gateways: The Internet in Indonesia. *Indonesia*, 63, 67–89. <https://doi.org/10.2307/3351511>.

Ilhami, Ahmad Irfan. (2018). Eksistensi Pers Islam dalam Dinamika Indonesia di Era Modern. *Mediakita*. Vol. 2. No. 2. Juli.

- Lev, D. S. (1965). The Politics of Judicial Development in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 7(2), 173–199. <http://www.jstor.org/stable/177758>.
- Lubis, T. M. (1990). *In Search of Human Rights: Legal-political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Doctoral dissertation, University of California, Berkeley).
- Luwarso, Lukas. (2010). Pers Indonesia, Pergulatan untuk Kebebasan. Diunduh 10/11/2010 dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/08/31/0006.html>.
- Manan, Bangir. (2013). "Kemerdekaan Pers dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum". Dalam *Jurnal Dewan Pers Ancaman Perundang-undangan terhadap Kemerdekaan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- McAdam, D. (1996). Conceptual Origins of Political Opportunity. *Comparative Perspectives on Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCargo, D. (2003). *Media and Politics in Pacific Asia (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203402542>.
- Mohtar Mas'ood. (1989). "Restrukturisasi Masyarakat oleh Pemerintah Orde Baru di Indonesia". *Prisma*, no. 7, Jakarta: LP3ES.
- Moscovici, S. (1985). Innovation and minority influence. Dalam S. Moscovici, G. Mugny, & E. van Avermaet (Eds.), *Perspectives on minority influence* (Vol. 9). Cambridge University Press.
- Osa, M., McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2004). Dynamics of Contention [Review of *Dynamics of Contention*]. *The Journal of Politics*, 66(4), 1324–1326. <https://doi.org/10.1017/s0022381600004333>.
- Paget, R. K. (1967). Indonesian newspapers 1965–1966. *Indonesia*, No. 4, 27–56. New York: Modern Indonesia Project, Cornell University. <https://doi.org/10.2307/3350910>.
- Pradhana, G. A., Md Syed, M. A., & Mohd Adnan, H. (2024). The challenges of debureaucratization of Televisi Republik Indonesia. *Media Asia*, 51(3), 378–397. <https://doi.org/10.1080/01296612.2023.2298115>.
- Prasetyo, Y. A. (2017). Kondisi pers Indonesia dan tantangan saat ini. *Jurnal Dewan Pers*, 16 (Desember), 13–14.
- Putra, I Gusti Ngurah. (2004). 'Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia'. *Jurnal Interaksi*, Vol. 3, No.2.
- Romano, A. (2003). Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203037607>.
- Scheingold, S. A. (1974). *The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political Change*. Yale University Press.
- Steele, Janet. (2012). The Making of the 1999 Indonesian Press Law. *Indonesia*, 94, 1–22. <https://doi.org/10.5728/indonesia.94.0001>.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Alternatif*. KBBI Daring. Diakses 1 Juni 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alternatif>.

Mukhid, H. K. (2022, 21 Juni). *28 tahun lalu Majalah Tempo dibredel, hari ini meluncurkan wajah baru Tempo Digital*. Tempo.co. Diakses 20 Maret 2024, dari <https://nasional.tempo.co/read/1604106/28-tahun-lalu-majalah-tempo-dibredel-hari-ini-luncurkan-wajah-baru-tempo-digital>.

Tempo.co. (n.d.). *Perbedaan serta daftar organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus*. Diakses 20 Maret 2024, dari <https://www.tempo.co/politik/perbedaan-serta-daftar-organisasi-mahasiswa-intra-dan-ekstra-kampus-159089>.

Rekaman Audiovisual

Marcelino Magno. (2020). *Pernyataan dalam webinar “Lahirnya AJI – Suara yang Tak Tertulis”* yang diselenggarakan oleh independent.id. Disiarkan melalui YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=WHdkFiSsrRQ&t=86s>. Diakses pada 4 Agustus 2020, pukul 11.54 WIB. Pernyataan terdapat pada menit 08:24–09:10.

Satrio Arismunandar. (2021). *Wawancara dalam webinar “Lahirnya AJI – Suara yang Tak Tertulis”*. Disiarkan melalui YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=WHdkFiSsrRQ>. Diakses pada 1 April 2021, pukul 09.26 WIB. Pernyataan terdapat pada menit 24:10–33:54.

AJI Indonesia. (2021). *Sejarah AJI*. [YouTube Video]. Diakses pada 3 Maret 2021, pukul 10.31 WIB, dari <https://www.youtube.com/watch?v=gwvkZwmK7Vk>.

Indah Nuritasari. (2021). *Pernyataan dalam webinar “Lahirnya AJI – Suara yang Tak Tertulis”*, bersama Marcelino Magno dan Satrio Arismunandar. Disiarkan melalui YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=WHdkFiSsrRQ>. Diakses pada 1 April 2021, pukul 09.26 WIB.

Wawancara Pribadi

Wawancara Satrio Arismunandar (Pendiri AJI), Ignatius Harryanto (Anggota AJI), Dasman Djamaluddin (Wartawan Senior Anggota PWI), Mohammad Iskandar (Sejarawan), Didik Pradjoko (Sejarawan), Abdurakhman (Sejarawan) pada 18 Januari 2023 di Laboratorium Sejarah FIB UI.



Wawancara dengan Ezki Pada 15 Oktober 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Wawancara dengan Dhia Prekasha Yoedha pada 17 Oktober 2024 di Kafe Kaizen Heritage, Matraman, Jakarta Timur.



Wawancara dengan Jus Soema Di Pradja pada 19 Oktober 2024 di Rumah Jus (Jl. Dahlia, Depok).



Wawancara dengan Dadang RHS dan Dhia Prekasha Yoedha via Google Meet pada 19 Oktober 2024.



Wawancara dengan Santoso via Zoom meeting pada 20 Oktober 2024.



Wawancara dengan Abdul Manan via Zoom Meeting pada 28 Oktober 2024.



Wawancara dengan Satrio Arismunandar yang kedua Pada 22 Oktober 2024 di Perumahan Cipayung, Depok.

